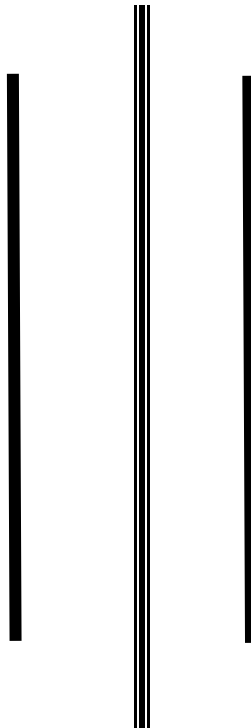




**RENCANA KERJA
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA
RESOR METRO JAKARTA SELATAN



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA

Nomor: Kep/ 54 / VI /2025

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menetapkan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Memperhatikan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
 3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/1362/IX/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Renja Polri Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA RAYA TENTANG RENCANA KERJA POLRES METRO JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

1. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 17 Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKSEL



NICOLAS ARY LILIPALY, S.I.K., M.H., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI 73090617

DAFTAR ISI

halaman

I.	Latar belakang	
1.	Kondisi Umum	01
a.	Perkembangan Aspek Kehidupan	04
b.	Analisis	42
2.	Identifikasi Masalah	44
II.	Tujuan dan Sasaran	48
1.	Visi dan Misi Polri	48
2.	Visi dan Misi Polres Metro Jakarta Selatan	49
3.	Tujuan Jangka Menengah	49
a.	Nasional	49
b.	Polri	49
c.	Polres Metro Jakarta Selatan	50
4.	Sasaran Prioritas	51
a.	Nasional	51
b.	Polri	52
c.	Polres Metro Jakarta Selatan	52
III.	Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2026	53
1.	Program Prioritas Nasional	53
2.	Sasaran Prioritas, arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2026	53
3.	Sasaran Prioritas, arah kebijakan dan strategi Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2026	93
IV.	Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026	124
1.	Program dan Kegiatan Polres Metro Jakarta Selatan	125
2.	Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026	128
V.	Penutup	132

Lampiran-lampiran

- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2026.
- Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RENJA K/L) Tahun Anggaran 2026.

RENCANA KERJA
POLRES METRO JAKARTA SELATAN
RAYA TAHUN ANGGARAN 2026

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2026 merupakan tahun ke-2 (dua) dari tahapan Rencana Strategis Polri 2025-2029 dan sebagai kelanjutannya dari Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2025 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 ini merupakan penjabaran dari *Grand Strategy* Polri Tahun 2025-2045 dan Rencana Strategis Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN 2025- 2029, yaitu Asta Cita meliputi: (1) memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; (3) melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi; (4) memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas; (5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; (6)

Membangun

membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; (7) memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan; (8) memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut sebagai penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2026 adalah tahun kedua dari RPJMN 2025-2029 sebagai kelanjutan dari *roadmap* Visi Indonesia emas 2025-2045.

Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan Kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polres Metro Jakarta Selatan dalam pengungkapan kasus khususnya tindak pidana terorisme, siber, narkoba, korupsi, perjudian, TPPO/barang maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat serta dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional walaupun masih ditemukan adanya komplain masyarakat terkait pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan. Keberhasilan yang dicapai oleh Polres Metro Jakarta Selatan tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Metro Jakarta Selatan dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas Kepolisian. Se jauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polres Metro Jakarta Selatan oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang. Keberhasilan yang diraih Polres Metro Jakarta Selatan diharapkan dapat membuat

Polres Metro Jakarta Selatan semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang.

Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polres Metro Jakarta Selatan untuk dapat senantiasa terus menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang Kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polres Metro Jakarta Selatan adalah:

(1) Polres Metro Jakarta Selatan yang semakin adaptif, profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil, dan humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang "*Presisi*"; (2) penegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis dan setara: Implementasi hukum harus adil dan legal, dengan menitikberatkan pada integritas dan transparansi dalam setiap proses; (4) fungsi intelijen Polres Metro Jakarta Selatan harus ditingkatkan melalui pendekatan berbasis data dan teknologi analitik yang lebih canggih. Implikasi strategis ini mendorong Polres Metro Jakarta Selatan untuk membangun kapasitas intelijen yang lebih kuat, tidak hanya dalam mendeteksi potensi ancaman, tetapi juga dalam menanggapi teror atau risiko keamanan lainnya secara tepat waktu dan efisien. Intelijen yang kuat adalah fondasi dari kemampuan Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjadi lebih prediktif dan preventif dalam menjaga keamanan nasional.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih adanya ditemukan: sifat eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, Hedonisme

hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, kejahatan siber, judi *online*, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan barang dan senjata serta TPPO. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah.

Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Metro Jakarta Selatan yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Global

Perkembangan lingkungan strategis global yang senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu seperti konflik geopolitik antar negara, isu hak asasi manusia, krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, siber dan kejahatan lintas negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik dapat dilihat sebagai berikut:

a) konsentrasi

- a) konsentrasi konflik aktor utama politik ekonomi masih berfokus di kawasan seperti di Asia Barat (Timur Tengah), Rusia-Ukraina, Laut Cina Selatan, Taiwan dan Afrika Utara, sementara agresifitas Cina dan bangkitnya Rusia serta pergolakan di Timur Tengah perang Iran-Israel yang dipicu oleh Israel menyerang pusat Nuklir Iran menambah kondisi ekonomi politik dunia semakin kompleks dan dinamis;
- b) perang tarif yang terjadi saat ini antara AS dan Cina serta negara lainnya sehingga perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi global selama 5 tahun mendatang diprediksi IMF sebesar 3,1% persen. Sementara dalam proyeksi *World Bank* pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2026 sebesar 3% atau lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi global;
- c) rendahnya pertumbuhan ekonomi global disebabkan adanya ketidakpastian yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, lemahnya pertumbuhan ekonomi negara-negara aktor utama ekonomi politik dunia seperti: Cina, Amerika Serikat dan Eropa, tinggi inflasi global, tinggi suku bunga global, fluktuasi harga pangan, minyak bumi dan bahan baku industri global, perubahan iklim, fragmentasi geoekonomi, keterbatasan ruang kebijakan pemerintah serta kondisi pasar keuangan global dan utang luar negeri;
- d) perlambatan ekonomi dunia menyebabkan melemahnya produktivitas, penurunan harga sejumlah komoditi seperti energi, mineral, logam dan produk- produk pertanian. Serta tantangan yang dihadapi Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi adalah tingginya utang luar negeri, melonjak harga pangan dan energi;
- e) perubahan

- e) perubahan gaya hidup dengan perkembangan teknologi robotik yang menggantikan tenaga manusia berimplikasi pada peningkatan pengangguran kelompok muda yang mudah diprovokasi untuk menimbulkan kegaduhan sosial yang ditandai dengan masifnya digitalisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*). Meningkatnya perang siber untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara dengan sasaran sabotase, peretasan dan *spionase* terhadap sistem komputer, militer dan pertahanan serta pengambilan data-data rahasia pemerintah negara lain bahkan pada sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi;
- f) kerusakan lingkungan berdampak pada kelangkaan lahan, kelangkaan pangan, kelangkaan sumber energi, kelangkaan air bersih dan udara bersih akan mengancam keamanan manusia. Hal tersebut diperparah dengan adanya perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga secara signifikan akan mempengaruhi dinamika politik, perekonomian dengan adanya krisis air dan pangan, munculnya berbagai penyakit pandemik, migrasi penduduk dan konflik sosial;
- g) perubahan gaya hidup dengan perkembangan teknologi robotik yang menggantikan tenaga manusia berimplikasi pada peningkatan pengangguran kelompok muda yang mudah diprovokasi untuk menimbulkan kegaduhan sosial yang ditandai dengan masifnya digitalisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*);
- h) meningkatnya

- h) meningkatnya perang siber untuk melemahkan kemampuan pertahanan suatu negara dengan sasaran sabotase, peretasan dan spionase terhadap sistem komputer, militer dan pertahanan serta pengambilan data - data rahasia pemerintah negara lain bahkan pada sistem pengelolaan listrik, air, bahan bakar, transportasi dan komunikasi;

2) Regional

Perkembangan kawasan Indo Pasifik dan *ASEAN* sebagai lingkungan strategis regional secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat ini dipengaruhi beberapa isu, yaitu: konflik politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerja sama antara negara *ASEAN* di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik yaitu sebagai berikut:

- a) adanya pergeseran Asia Pasifik sebagai medan pertarungan Cina dan Amerika Serikat untuk memperebutkan kawasan yang memiliki 40% transaksi dunia. Laut Cina Selatan, Semenanjung Korea dan Laut Cina Timur menjadi wilayah yang menjadi pemicu lahirnya peperangan terbuka yang melibatkan negara-negara berbatasan;
- b) berdirinya 2 blok perdagangan yang masing-masing berafiliasi ke Amerika Serikat dan Cina yaitu *Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP)* yang dimotori oleh negara-negara maju seperti Jepang, Australia, New Zealand, Kanada dan Singapura dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

(RCEP) yang digagas oleh negara-negara anggota ASEAN dan didukung oleh Cina. Serta terbentuknya pakta pertahanan strategis trilateral bernama AUKUS yang dibentuk oleh aliansi baru Amerika Serikat dengan Inggris dan Australia dinilai memiliki potensi dampak yang cukup signifikan dan mampu mengguncang ranah geopolitik global khususnya di Indo Pasifik;

- c) adanya pergeseran isu keamanan di ASEAN dari *state security* ke *human security* semakin memantapkan daya antisipasi wilayah ASEAN sebagai wilayah yang memiliki sejarah panjang tentang narkoba, penyelundupan, perdagangan manusia, separatisme dan terorisme serta rencana masuknya sejumlah negara ASEAN seperti Indonesia dalam kerjasama ekonomi Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan (BRICS) akan mempengaruhi keseimbangan di wilayah ASEAN. Kondisi tersebut akan meningkatkan provokasi Cina dalam mendinamisir ekonomi, politik dan keamanan di Indopasifik terutama Laut Cina Selatan;
- d) berbagai isu yang mengganggu Indonesia-Australia antara lain persoalan pengungsi, Narkoba, terorisme dan isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang berpengaruh pada gerakan separatisme Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative Organization (WPPRO)* dan aktif melakukan propaganda;

3) Nasional

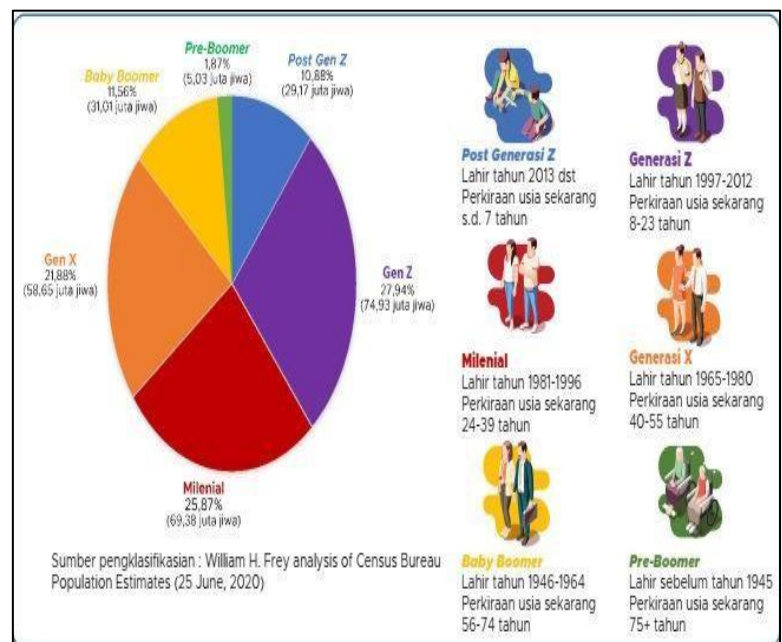
a) Geografi

- (1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas daratan 1,9 juta km² dan lautan 7,9 juta km² dengan jumlah pulau 17.504 dan 16.056 telah dibakukan namanya letak geografis Indonesia yang strategis selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut. Selain itu, Indonesia juga menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, terutama perdagangan antara negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang, menjadi titik persilangan perdagangan antara Jepang, Korea, Cina dengan negara-negara di Afrika, Australia dan Eropa;
- (2) posisi Indonesia terletak antara benua Australia dan benua Asia dan berada pada pertemuan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan pertemuan rangkaian pegunungan sirkum mediterania dan sirkum pasifik. Selain wilayah Indonesia juga berada pada pertemuan tiga lempeng yaitu bagian utara berbatasan dengan tameng Asia yang mengalami perluasan yang dikenal dengan Lempeng Asia, bagian barat dan selatan berbatasan dengan benua Gondwana India, dasar Samudera Hindia, Australia, dan perluasan yang dikenal dengan Lempeng Indo Australia, dan bagian timur yaitu dasar Samudera Pasifik;
- (3) Indonesia memiliki batas wilayah sebelah utara dengan Filipina, Malaysia dan Singapura; sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste; sebelah selatan berbatasan dengan Australia,
Sebelah

sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Srilanka. Perbatasan darat dengan Timor Leste sepanjang 253 km, dengan Malaysia sepanjang 1,881 km, dan dengan Papua Nugini sepanjang 824 km;

b) Demografi

- (1) Indonesia memiliki luas daratan luas daratan Indonesia mencapai 1.919.440 km² yang terbagi dalam 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Berdasarkan data BPS pertengahan 2024, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 275.773.800 jiwa, tahun 2023 sebanyak 278.696.200 jiwa dan pada tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa dengan komposisi jumlah laki-laki mencapai 50,5% dan perempuan 49,5%;
- (2) jumlah usia produktif (15-64 tahun) adalah 197,1 juta jiwa dengan komposisi generasi x (40-55 tahun) berjumlah 20,4 juta jiwa atau 9,6%, generasi z (8-23 tahun) berjumlah 44,4 juta jiwa atau 20,7% dan generasi milenial (24-39 tahun) berjumlah 66,15 juta jiwa atau 30,9%, sementara jumlah lansia 31,9 juta jiwa atau 14,9%;



Gambar

Gambar 1. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia

- (3) distribusi penduduk Indonesia tidak merata dan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Penduduk yang mendiami Pulau Jawa mencapai 55,93% dari total penduduk Indonesia, Pulau Sumatera memiliki proporsi 21,81%, Pulau Sulawesi memiliki proporsi 7,36%, Pulau Kalimantan memiliki proporsi 6,18%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki proporsi 5,56%, Pulau Papua memiliki proporsi 2,00% dan Pulau Maluku memiliki proporsi 1,17%;



Gambar 2. Sebaran Penduduk Per Provinsi

- (4) tingkat kepadatan penduduk Indonesia adalah 156 jiwa per km. Laju pertumbuhan penduduk 2023 yaitu 1,13% dan melambat dari periode sebelumnya 1,25%;
- (5) usia harapan hidup meningkat. Pada tahun 2021 usia 73,46 tahun meningkat tahun 2022 mencapai usia 73,6 tahun dan meningkat lagi tahun 2023 menjadi usia 73,93 tahun. Jumlah lansia meningkat menjadi jumlah lansia 31,9 juta atau 14,9% dari tahun 2023 yaitu

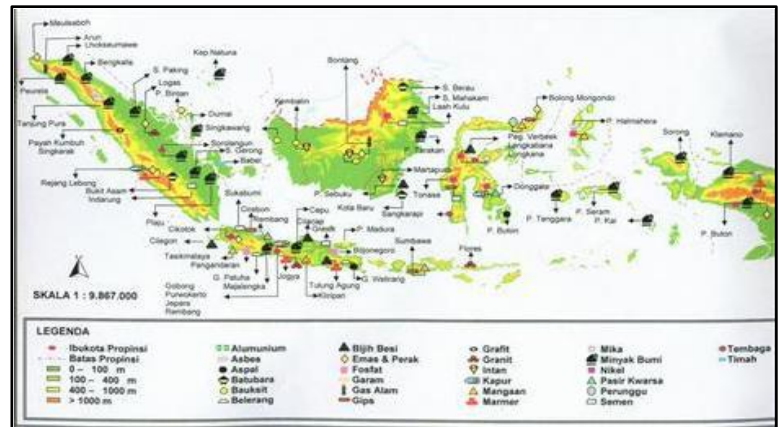
yaitu 29 juta. Ketimpangan di Indonesia terus mengalami penurunan, meskipun penurunannya tidak sebesar angka kemiskinan. Dalam periode tahun 2015-2023, Indonesia berhasil menurunkan Rasio Gini dari 0,402 menjadi 0,388. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan ditargetkan mencapai angka 6,50-7,50 persen;

c) Sumber Daya Alam

Sumber daya alam Indonesia tersebar secara tidak merata di seluruh Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia di golongkan menjadi 2 yaitu persebaran sumber daya alam hayati dan persebaran sumber daya alam barang tambang. Sumber daya alam hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan nabati, yaitu:

- (1) sumber daya alam nabati, Indonesia dianugerahi tanah yang subur sehingga tumbuhan dapat tumbuh dengan sempurna di wilayah Indonesia. Wilayah Flora di Indonesia meliputi hutan tropis, hutan musim, stepa dan sabana;
- (2) sumber daya alam hewani, pada umumnya wilayah persebaran fauna di Indonesia dibagi 3 wilayah yaitu wilayah Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, Indonesia bagian Timur. Ketiganya di batasi oleh *Wallace* dan garis *Weber*. Bagian Barat lebih cenderung mengikuti ragam hewan Asia, sedangkan bagian Timur mengikuti ragam hewan Australia. Ciri-ciri kasus hewan Indonesia terdapat pada wilayah bagian Tengah;
- (3) sebaran hasil tambang, kekayaan tambang Indonesia tersebar secara tidak merata. Peta berikut ini menjelaskan sebaran hasil tambang di Indonesia;

Gambar



Gambar 3. Sebaran Tambang di Indonesia

Berdasarkan peta tersebut dapat dijelaskan bahwa tambang yang dihasilkan oleh bumi Indonesia dan daerah penghasilnya;

d) Ideologi

- (1) Indonesia didirikan dan dibangun oleh berbagai pikiran yang memiliki latar belakang berbagai ideologi sehingga tercipta Pancasila sebagai ideologi negara;
- (2) Sejarah perjuangan kekerasan berlatang belakang ideologi baik Islam maupun komunis di Indonesia masih menjadi trauma baik upaya yang dilakukan komunis dengan pemberontakan tahun 1948 dan 1965 yang menjadikan PKI sebagai partai terlarang dan gerakan yang dilakukan oleh kelompok Islam karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah seperti DI/TII;
- (3) tren dunia yang mengarah pada deglobalisasi, disrupsi teknologi dan isu HAM dan lingkungan, kebutuhan energi dan pasokan bahan baku industri harus menjadi perhatian karena dapat mengancam keutuhan kebhinekaan Indonesia di tengah

Pertarungan

pertarungan besar yang semakin menguat antara AS dan Cina;

- (4) dalam konteks politik luar negeri masih dipengaruhi ideologi politik, pola kerja sama mengarah pada kerja sama dalam ideologi ekonomi;
- (5) saat ini Indonesia berada di tengah-tengah pertarungan ideologi asing yang bisa mempengaruhi cara pandang masyarakat dan mengancam kebhinekaan yang telah menjadi komitmen bangsa. Ancaman masuknya ideologi asing dapat menggoyahkan ketahanan ideologi nasional, dan berdampak pada kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Upaya perkawinan nilai-nilai universal dengan nilai budaya dan kearifan lokal semakin menambah keragaman khazanah budaya. Dalam konteks ini yang perlu dicermati adalah benturan antar aktor dalam melakukan ekspansi budaya yaitu blok Barat yang didukung oleh Amerika Serikat dan Eropa, Koalisi Cina dan Timur Tengah dan Islam;

e) Politik

- (1) hasil Pemilu 2024 telah menghadirkan komposisi baru baik di eksekutif maupun legislatif. Pemerintah mulai adaptif berkoordinasi terkait kelembagaan dan program kebijakan, anggaran dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota, serta masih adanya pengaruh Presiden ke-7 yang berdampak pada dinamika politik tahun 2026;
- (2) harmonisasi, adaptasi penyesuaian program dan anggaran baik nasional maupun daerah karena adanya perubahan prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut akan terjadi secara nasional, provinsi

Maupun

- maupun kabupaten dan kota. Penyelesaian terhadap RUU yang belum rampung dan menjawab peraturan perundangan yang dinilai bermasalah akan menjadi konsentrasi pemerintah dan DPR RI. Di mana benturan kepentingan dan adanya *reshuffle* kabinet dan perubahan peta politik pada tahun 2026 akan mewarnai termasuk penyesuaian program, kebijakan dan anggaran akan menjadi fokus pemerintahan baru. Hal tersebut untuk mewujudkan janji politik dan visi Indonesia. Potensi munculnya konflik horizontal dalam menyikapi penataan hubungan pusat daerah;
- (3) perpindahan Ibu Kota Negara meskipun belum menjadi fokus 2026. Hal tersebut erat kaitannya dengan arah pembangunan dan pemerataan dan otonomi daerah. Kontrol pemerintah terhadap Pemerintah Daerah semakin diperketat, sebagian urusan akan ditarik ke pusat. Hal tersebut berdampak pada pola perizinan, PAD dan penataan aset. Kondisi di daerah akan mencerminkan yang terjadi di pusat, yaitu terjadi euforia dan penataan kembali sejumlah lembaga di daerah dengan penyesuaian kebijakan dan anggaran;
 - (4) kasus hukum terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang akan dipermasalahkan berkaitan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - (5) penyusunan regulasi-regulasi baru dalam rangka penyesuaian dengan agenda pembangunan dan struktur serta nomenklatur Kementerian dan Lembaga serta penyelerasan adanya tumpang tindih

kebijakan akan menghambat implementasi kebijakan;

- (6) banyak moral dan etika yang ditinggalkan oleh elit politik akan meningkatkan segregasi, semangat primordialisme, dan merebaknya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal tersebut ditandai dengan akomodasi seluruh kepentingan politik akan mempengaruhi politik dan kebijakan;

f) Ekonomi

(1) pemulihan ekonomi

- (a) perubahan prioritas, arah dan kebijakan pembangunan berdampak pada model pendekatan;
- (b) fluktuasi harga pangan dan minyak bumi berdampak pada meningkatnya harga-harga dalam negeri;
- (c) pemberlakuan kebijakan kenaikan pajak PPN tidak memberikan nilai tambah ekonomi nasional. Hal tersebut cenderung membebani perekonomian karena menurunkan daya beli masyarakat;

(2) pertumbuhan ekonomi

- (a) kapasitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan populis subsidi belum diimbangi dengan adanya industrialisasi pertumbuhan, sehingga tidak mampu mendongkrak;
- (b) Indonesia mengalami tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya konsumsi dan upaya pemulihan ekonomi dengan stimulus fiskal dan moneter;
- (c) masuknya

- (c) masuknya Indonesia ke *BRICS* tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diprediksi terkendala pada angka 5,1%;
 - (d) target pertumbuhan ekonomi 8% dengan Asta Cita yang tertuang ke dalam 17 program pembangunan nasional, dengan dukungan arsitektur Kabinet Merah Putih yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya karena adanya spesialisasi dan penambahan sejumlah Kementerian/ Lembaga atau badan baru berdampak pada keefektifan dalam pelaksanaan program, pengendalian dan anggaran;
- (3) keuangan negara
- (a) keuangan negara pada tahun 2026 masih mengandalkan utang luar negeri untuk menutup defisit APBN. Pendapatan negara masih mengandalkan sektor perpajakan;
 - (b) sementara kinerja ekspor impor Indonesia cenderung menurun karena adanya kebijakan kemudahan impor Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024;
 - (c) cicilan utang luar negeri masih mendominasi pengeluaran APBN yang mencapai 30% atau sekitar 1300T. Hal tersebut berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk program-program prioritas;
- (4) sektor-sektor perekonomian
- (a) sektor UMKM
 - politik dumping Cina kepada anggota *BRICS* berpotensi mengancam produk dalam negeri.

Membanjirnya

Membanjirnya produk Cina akan mematikan UMKM Indonesia. Hal tersebut pada komoditi tekstil, elektronik dan alat kebutuhan rumah tangga, sementara neraca perdagangan Indonesia tahun 2023-2024 mengalami defisit 0,77%;

- (b) sektor industri dan perdagangan pembangunan infrastruktur yang dilakukan belum mampu untuk memacu kinerja industri. Sebagian industri besar mengalihkan investasinya ke negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Hal tersebut disebabkan oleh faktor harga tenaga kerja dan kepastian hukum. Produktifitas industri dalam negeri yang rendah menyebabkan harga barang relatif lebih mahal dibandingkan barang impor. Hal tersebut menyebabkan membanjirnya barang-barang impor dan rendahnya devisa negara. Lebih dari itu, kemudahan impor semakin memperburuk kinerja industri nasional;
- (c) sektor pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan
 - i) permasalahan yang muncul dari sektor ini dari tahun ke tahun relatif sama yaitu harga komoditas yang rendah, distribusi yang mahal, dan banyaknya konflik lahan, pupuk yang langka. Kinerja relatif rendah karena minimnya penggunaan teknologi dan minimnya perhatian pemerintah menjadikan sektor ini banyak

ditinggalkan

ditinggalkan karena dinilai tidak menjanjikan;

- ii) sektor kehutanan dan perkebunan. Sektor ini sering menghadirkan konflik karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan. Selain itu, konflik lahan berkaitan sektor ini terjadi antara masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Isu lingkungan, deforestasi, kebakaran hutan menjadi dampak yang menjadi perhatian dunia karena mengancam masa depan umat manusia;
 - iii) sektor perikanan. Sektor ini relatif berkembang baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap. Namun, sering terjadi pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan asing;
- (d) penyelundupan impor ilegal
- faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyeleundupan adalah adanya halangan baik berupa tarif atau kuota. Barang-barang yang sering diselundupkan antara lain:
- i) penyelundupan barang-barang hasil pertanian karena belum terkoordinasinya sistem logistik dalam negeri dan murah nya harga di luar negeri merusak pasar produk pertanian. Penyelundupan terjadi pada komoditas beras, bawang merah, bawang putih, gula rafinasi dan daging;

ii) penyelundupan

- ii) penyelundupan bahan-bahan kimia Kebutuhan industri farmasi dan penyalahgunaan bahan-bahan kimia sering dilakukan. Penggunaan asam nitrat dalam bom beirut tahun 2020 menjadikan penyelundupan bahan-bahan kimia perlu diawasi secara ketat;
 - iii) penyelundupan barang mewah gaya hidup masyarakat dan murahnya barang di luar negeri menjadi faktor terjadinya penyelundupan barang.
- (e) Pertambangan
- i) kebijakan hilirisasi setengah hati dan minimnya jumlah smelter yang dimiliki oleh perusahaan tambang menjadikan ekspor barang mentah hasil tambang meningkat dan terjadinya penyelundupan;
 - ii) konflik sosial pertambangan antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah karena adanya konflik lahan dan tenaga kerja;
 - iii) penyerahan tambang ke ormas memicu konflik antar masyarakat;
- g) Aspek Sosial Budaya
- (1) segregasi masyarakat akan meningkat pada Tahun 2026 terutama dalam menyikapi hasil kebijakan. Kebebasan berekspresi dan penggunaan teknologi informasi akan memperkuat fenomena ini;
 - (2) perubahan kurikulum, sistem zonasi bagi pendidikan dasar menengah;

(3) akulturasi

- (3) akulturasi dan benturan budaya global dan kearifan lokal yang bersumber dari aktor budaya global, yaitu barat, koalisi Cina dan Islam (Timur Tengah).
 - (4) isu pelayanan kesehatan BPJS, munculnya wabah dan penyakit. Pelepasan nyamuk hasil rekayasa genetika pada tahun 2023 akan mengalami dampak yang nyata pada tahun 2026;
 - (5) segregasi masyarakat berdasarkan etnis dan agama. Dan perubahan gaya hidup dengan perkembangan teknologi robotik yang menggantikan tenaga manusia berimplikasi pada peningkatan pengangguran kelompok muda yang mudah diprovokasi untuk menimbulkan gangguan Kamtibmas;
- h) Aspek Keamanan
- (1) indikator kriminalitas
 - (a) jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa/kelurahan;
 - (b) interval *crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun;
 - (c) kecenderungan pada tahun 2026 relatif sama dengan tahun 2021 dengan pola eskalasi yang berbeda serta konflik sosial semakin dinamis dengan adanya pergantian pemerintahan di semua level.

Untuk memperkirakan kondisi keamanan pada tahun 2026 diprediksi bahwa wilayah dengan angka kejahatan tinggi, seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, cenderung memiliki ciri-ciri yang sama yaitu populasi yang padat, pusat ekonomi yang besar dan banyaknya aktivitas urban yang dinamis. Di sisi lain, wilayah dengan angka kejahatan rendah seperti Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Maluku Utara adalah daerah yang jumlah penduduknya relatif sedikit, dengan aktivitas ekonomi yang tidak sekompleks pada wilayah tiga tertinggi.

4) Daerah Khusus Ibu kota Jakarta dan sekitarnya

a) Geografi

- (1) Daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan meliputi wilayah administrasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Selatan wilayah, (10 kecamatan), ditunjang oleh kawasan aglomerasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Depok dan Tangerang Selatan sebagai pendukung. Disebelah utara terdapat Jakarta Pusat Dan Jakarta Barat, disebelah selatan berbatasan dengan Depok, disebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Selatan. Luas daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan adalah 141,27 km² dengan perincian sebagai berikut:

No	SATKER	LUAS WILAYAH		KET
1	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	48,13	KM2	
2	POLRES METRO JAKARTA BARAT	129,54	KM2	
3	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	141,27	KM2	
4	POLRES METRO JAKARTA UTARA	147,212	KM2	
5	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	188,03	KM2	
6	POLRES METRO TANGERANG KOTA	322,55	KM2	
	- KEC WILAYAH TANGERANG KOTA	164,55	KM2	
	- KEC. TELUK NAGA	40,58	KM2	MASUK WIL TANGE RANG KAB
	- KEC. KOSAMBI	29,76	KM2	
	- KEC. SEPATAN	17,32	KM2	
	- KEC. SEPATAN TIMUR	18,27	KM2	
	- KEC. PAKU HAJI	51,87		
7	POLRES METRO BEKASI KOTA	213,12	KM2	
8	POLRES METRO BEKASI	1.273,88	KM2	
9	POLRES METRO DEPOK	259,03	KM2	
	Wilayah Depok	199,91	KM2	

No	SATKER	LUAS WILAYAH		KET
	- KEC. BOJONG GEDE	28,34	KM2	MASUK WIL KAB BOGOR
	- KEC. TAJUR HALANG	30,78	KM2	
10	POLRESTA BANDARA SOETTA	18,6	KM2	
11	POLRES TJ. PRIOK	0	KM2	
12	POLRES KEPULAUAN SERIBU	8,7	KM2	
13	POLRES TANGERANG SELATAN	326,23	KM2	
	KEC. WILAYAH TANGERANG SELATAN	165,85	KM2	
	- KEC CISAUK	27,77	KM2	MASUK WIL TANGE RANG KAB
	- KEC LEGOK	35,13	KM2	
	- KEC PAGEDANGAN	45,69	KM2	
	- KEC CURUG	27,41	KM2	
	- KEC KELAPA DUA	24,38	KM2	
	JUMLAH	3.076,29	KM2	

- (2) Undang Undang No 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, mengatur mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan. Sedangkan Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional, maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar, baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.

b) Demografi

- (1) Sebagai pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global Provinsi Daerah Khusus Jakarta akan tetap menjadi sasaran, dan tujuan kedatangan masyarakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai harapan, dan kepentingan sehingga berbagai suku dari seluruh Indonesia terdapat di kota Jakarta, sedangkan suku Betawi sebagai penduduk asli mulai tergusur keberadaannya. Disamping penduduk Indonesia asli, tidak sulit pula menemukan Warga Negara Asing dari berbagai Negara di dunia, hal tersebut tidak lepas dari posisi kota Jakarta sebagai pusat Perekonomian Nasional, Kota Global dan pintu gerbang Indonesia;

(2) Dengan

- (2) Dengan jumlah penduduk yang besar disamping sebagai modal dasar pembangunan juga mengandung kerawanan dengan dimensi kerawanan yang luas dan kompleks. Hal tersebut disebabkan masih belum berimbangnya laju penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia dan sebagai akibat langsung dari kondisi tersebut adalah tingginya angka pengangguran;
- (3) Daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.409. 380 jiwa dan Tingkat kepadatan 15.390 jiwa/km² dengan sebaran untuk tiap - tiap kesatuan kewilayahan, sebagai berikut:

No	SATKER	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	KET
1	POLRES METRO JAKARTA PUSAT	1.103.357	22.929	
2	POLRES METRO JAKARTA BARAT	2.611.515	20.132	
3	POLRES METRO JAKARTA SELATAN	2.409.380	15.390	
4	POLRES METRO JAKARTA UTARA	1.873.096	12.723	
5	POLRES METRO JAKARTA TIMUR	3.037.139	17.631	
6	POLRES METRO TANGERANG KOTA	2.531.762	32.927	
	WILAYAH TANGERANG KOTA	1.912.679	11.624	

Kec

No	SATKER	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK	KET
	- KEC. TELUK NAGA	167.201	3.137	
	- KEC. KOSAMBI	111.852	3.798	
	- KEC. SEPATAN	108.425	6.129	
	- KEC. SEPATAN TIMUR	105.255	5.471	
	- KEC. PAKU HAJI	126.350	2.768	
7	POLRES METRO BEKASI KOTA	2.627.210	12	
8	POLRES METRO BEKASI	3.237.420	2.541	
9	POLRES METRO DEPOK	2.580.994	31.103	
	Wilayah Depok	2.145.400	16.265	
	- KEC. BOJONG GEDE	303.609	10.493	
	- KEC. TAJUR HALANG	131.985	4.345	
10	POLRESTA BANDARA SOETTA	0	0	
11	POLRES TJ. PRIOK	0	0	
12	POLRES KEPULAUAN SERIBU	28.523	2.881	

13	POLRES TANGERANG SELATAN	2.067.416	28.047,91	
	Wilayah Tangerang Selatan	1.404.785	8.522	
	- KEC CISAUK	89.140	3.046	
	- KEC LEGOK	123.090	4	
	- KEC PAGEDANGAN	108.521	4.135	
	- KEC CURUG	174.666	5.740	
	- KEC KELAPA DUA	167.214	6.601	
	JUMLAH	24.107.812	186.316,91	

c) Sumber Daya Alam DKI Jakarta

(1) pertambangan pasir.

Penambangan pasir masih dapat ditemukan di wilayah Tangerang, dan Bekasi. Pada umumnya penambangan pasir masih dilakukan secara tradisional, dan dijual sebagai bahan bangunan. Sementara di beberapa daerah di Bekasi masyarakat memproduksi batu bara merah, batako, dan genteng sebagai mata pencaharian, karena kualitas tanahnya memadai untuk industri tersebut.

(2) hasil laut.

a) Hasil laut masih cukup tersedia di wilayah Utara Jakarta, daerah Kepulauan Seribu, pesisir Tangerang dan Bekasi. Masyarakat setempat menjadikan hasil laut sebagai mata pencaharian. Hasil laut yang mempunyai nilai ekonomis, antara

lain

lain: ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar, udang dan rumput laut;

- b) Kekayaan laut di wilayah Utara Jakarta, pesisir Tangerang dan Bekasi masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebab masyarakat nelayan masih ditemukan cara menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, sehingga merusak ekologi laut populasi laut dan kelestarian alam laut serta penebangan hutan bakau tanpa memperhatikan lingkungan dan merusak kehidupan ekosistem laut;
- c) Usaha tambak yang terdapat dipinggir laut antara Tangerang, dan Bekasi diusahakan oleh warga masyarakat dengan cara tradisional, sehingga hasil tambak tidak optimal bahkan ada pemilik tambak yang menyewakan kepada orang lain, karena kesulitan pemodalan dan pemilik tambak menjadi pengelola tambak yang diupah oleh penyewa yang notabene bukan warga setempat.

(3) pertanian.

Lahan pertanian di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan dari waktu ke waktu semakin berkurang, sebab sebagian lahan pertanian di wilayah Tangerang, Bekasi dan Depok telah berubah fungsi menjadi pemukiman penduduk ataupun daerah industri, sementara masyarakat mulai beralih menjadi pekerja pabrik.

(4) sumber air.

- (a) Sumber air di wilayah Jakarta berasal dari Bogor yang mengalir ke Jakarta melalui sungai Ciliwung, dan anak sungai Ciliwung. Air ini digunakan

digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum setelah dilakukan penjernihan oleh PDAM yang saat ini dikelola oleh dua perusahaan dari Perancis dan Inggris;

- (b) Aliran air dari Bogor disamping sebagai bahan baku air minum warga Jakarta juga menjadi salah satu penyumbang banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pola hidup warga masyarakat Jakarta yang membuang sampah sembarangan, sistem drainase yang kurang baik, penyempitan alur sungai serta kondisi tanah Jakarta 40 % berada dibawah permukaan laut.

d) Ideologi

- (1) Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia masih diterima oleh bangsa Indonesia, namun sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, muncul keinginan dari kelompok masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila dengan ideologi lain yang berorientasi kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis, cenderung masih akan terus berlanjut;
- (2) kalangan islam radikal tetap eksis memperjuangkan penggunaan hukum/syariat Islam sebagai dasar negara, indikator upaya menerapkan syariat Islam di Indonesia, antara lain:
 - (a) Deklarasi Front Persaudaraan Islam sebagai bentuk baru dari Front Pembela Islam yang telah dilarang organisasi dan kegiatannya menjadi

sulit

sulit dikendalikan pergerakannya oleh pemerintah karena mereka tidak mendaftarkan organisasi barunya sesuai perundang-undangan;

- (b) pasca dibubarkan oleh pemerintah, anggota Ormas HTI melebur ke berbagai organisasi masyarakat, Parpol maupun non Parpol. Melakukan penggalangan ke sejumlah pemuda melalui kegiatan pengajian maupun perekrutan organisasi dan aktif disejumlah media sosial sehingga pergerakannya sulit dimonitor.
 - (c) kegiatan yang dilakukan beberapa Ormas Islam seperti Jamaah Ansyorul Tauhid, MMI, yang berisi penolakan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah tentang kerukunan antar umat beragama karena tidak sesuai dengan syariat Islam.
- (3) kegiatan eks nabi politik yang memperjuangkan ideologinya seperti ideologi komunis masih terus dilakukan, beberapa tokoh muda ditenggarai sudah masuk dalam berbagai Parpol bahkan duduk menjadi fungsionaris, indikasi adanya upaya menghidupkan ideologi komunitas, antara lain:
- (a) hingga saat ini eks G 30 S/PKI masih eksis memperjuangkan peninjauan status hukum mereka dengan meminta ganti rugi, disamping mereka tetap menuntut hak-haknya dalam bidang politik;
 - (b) eks nabi G 30 S/PKI membentuk organisasi yang secara rutin melakukan pertemuan untuk

membahas

membahas perjuangan mereka dibidang politik, ekonomi dan budaya.

- (4) adapun indikator masih eksisnya aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang berhaluan kiri/komunis, antara lain berupa :
- (a) ditemukannya gambar palu arit di berbagai tempat umum;
 - (b) pembentukan lembaga-lembaga yang memperjuangkan keturunan/keluarga PKI yang dihukum pada era pemerintahan Orde Baru;
 - (c) seminar/dialog/lokakarya/pertemuan yang dihadiri oleh eks Napol/ Tapol PKI, dan PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru) untuk mengoreksi diskriminasi;
 - (d) peredaran bahan bacaan yang dibuat oleh eks Tapol/Napol PKI.
- (5) kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum reformasi, demokratisasi, dan HAM mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan berbagai elemen bangsa menuntut, dan memperjuangkan "kebebasan" tanpa mengindahkan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia;
- (6) kelompok eks Napi masih akan terus melakukan berbagai pertemuan untuk memperjuangkan keinginan mereka mendapat rehabilitasi dan ganti rugi sementara kelompok Islam radikal maupun kelompok liberal masih akan terus eksis melakukan aktivitasnya meskipun hingga saat ini hanya bagian terkecil masyarakat Jakarta yang bergabung, namun dengan berjalannya

waktu

waktu diperkirakan akan semakin bertambah jumlah massanya.

e) politik

- (1) Konflik internal Parpol masih dialami beberapa Parpol yaitu PDIP, PPP, Golkar, Partai berkarya, Hanura dan PKPI;
- (2) Pasca pengesahan UU DKJ, sejumlah persiapan tengah disiapkan pemerintah untuk melakukan perpindahan ibukota ke IKN. Berdasarkan UU IKN dibagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan, fase kedua (2025-2029) pengembangan *shared office* di IKN, fase ketiga (2030-2039) pengembangan *agile government*;
- (3) Pembahasan RUU yang menjadi prioritas dalam Prolegnas 2026 serta permasalahan yang timbul akibat penerapan UU yang telah disahkan seperti UU Ciptaker, UU ITE, RUU Perampasan Aset, RUU KUHAP dan UU lainnya masih berpotensi menimbulkan kerawanan di masyarakat;
- (4) Adanya kegiatan-kegiatan masyarakat dan keagamaan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan politik praktis;
- (5) Maraknya aksi-aksi unjuk rasa oleh kelompok masyarakat, mahasiswa, ormas dan LSM terkait masalah politik, hukum, kasus-kasus korupsi dan kebijakan pemerintah.

f) Ekonomi

f) ekonomi

(1) Pinjaman *Online*

Akhir-akhir ini kasus Pinjol semakin marak terjadi. Banyak sekali anak muda khususnya yang terlilit dengan utang Pinjol. Jumlah utang yang belum terbayarkan di Indonesia lebih 2 kali lipat dari pengguna kartu kredit yang sebanyak 6 juta. Pinjol berdampak buruk bagi penggunanya, jumlah orang yang mengakhiri hidupnya, percobaan bunuh diri (berhasil diselamatkan), dan membunuh orang lain karena pinjaman *online* ilegal lebih banyak dari korban Covid19.

(2) Permasalahan Transportasi *Online* (KR 2 dan KR 4)

Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang mengatur terkait permasalahan taksi *online* dan ojek *online* antara lain:

(a) Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2017 Revisi Menjadi Peraturan Menteri Nomor 108 TH 2017, dan di revisi kembali menjadi Peraturan Menteri 117 dan 118 Tahun 2018. (Taksi *Online* / KR 4);

(b) Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 dan Keputusan No 348 Tahun 2019 (Ojek *Online*/ KR 2)

Regulasi tersebut masih belum bisa menyelesaikan permasalahan terkait Ojol dan taksi *online* antara lain:

- i. tarif.
- ii. skema poin.
- iii. kemitraan.
- iv. kuota penerimaan *driver*.
- v. *suspend* sepihak.

(3) Fluktuasi

(3) Fluktuasi harga bahan pangan

Kenaikan harga bahan pangan merupakan faktor pemicu utama inflasi di Indonesia. Pergerakan harga bahan pangan selain yang tidak terkendali, juga tidak lazim atau dapat dikatakan merupakan anomali tersendiri. Hal ini karena ketika harga BBM turun bahkan harga bahan pangan dunia turun, harga bahan pangan di Indonesia justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga bahan pangan disebabkan oleh: Monopoli pasar, perilaku para spekulan, kurangnya stok cadangan bahan pangan, serta rantai distribusi yang panjang.

(4) Fluktuasi BBM

sesuai ketentuan pemerintah sebagai badan usaha hilir migas, Pertamina tunduk pada mekanisme penentuan harga dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yakni harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah.

(5) Fluktuasi Kurs

faktor yang mempengaruhi :

- (a) kebijakan pemerintah;
- (b) kondisi ekonomi Negara;
- (c) faktor tak terduga (bencana alam atau kerusakan yang bisa segera mempengaruhi kondisi politik, perekonomian, dll).

Keadaan ekonomi suatu negara yang sehat adalah jika fluktuasi nilai mata uang mereka seimbang, dalam artian tidak terus-menerus menguat ataupun terus melemah.

(6) Penggusuran pedagang kaki lima

Pemprov DKI masih akan terus melakukan penertiban
Kepada

kepada pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang tidak tepat misalnya, halte, trotoar, jalur hijau, taman kota, dan lain-lain.

(7) Penggusuran pemukiman

beberapa instansi pemerintah antara lain PT KAI, TNI AD masih akan melakukan pembebasan tanah, perumahan, lahan yang dapat menimbulkan benturan pada saat pelaksanaan penggusuran.

(8) Konflik pengurus apartemen

sampai saat ini terdapat 281 unit rumah susun dan apartemen yang telah berbadan hukum sebanyak 175 unit dan yang belum berbadan hukum sebanyak 106 unit. Sedangkan 23 unit diantaranya terjadi konflik kepengurusan.

(9) Harga BBM diserahkan kepada mekanisme pasar.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menimbulkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

(10) Kebijakan Impor

(a) Pemerintah membuka opsi import beras karena produksi beras dalam negeri tidak mencapai target 5 %;

(b) kebijakan pemerintah impor sapi;

(c) kebijakan pemerintah impor garam;

(d) kebijakan pemerintah impor gula.

g) sosial budaya

Di bidang Sosial Budaya, permasalahan utama konflik sosial yang muncul yaitu gejala-gejala konflik antar pemeluk agama lebih banyak disebabkan oleh pembangunan tempat-tempat ibadah atau pengalihan fungsi bangunan menjadi tempat aktivitas ibadah yang ditolak oleh Kelompok

kelompok masyarakat lokal yang melibatkan Ormas Islam dari luar diantaranya FPI, FUI, MMI dan Ormas Islam garis keras lainnya. Begitu juga elemen 212 yang terus melakukan aksi dengan mengangkat isu utama terkait keagamaan, namun berpotensi memicu konflik yang berbau SARA. Disisi lain permasalahan buruh masih menghambat terkait penerapan UU Cipta Kerja dan penetapan UMP dan UMK.

h) keamanan

Di bidang keamanan, permasalahan judi *online* masih terjadi di sejumlah lapisan masyarakat. Bentrok antar organisasi masyarakat (Ormas) masih terjadi di sejumlah wilayah dilatar belakangi permasalahan penguasaan lahan, penarikan kendaraan oleh *debt collector*. Kemudian konflik antar warga juga kerap terjadi berulang di lokasi yang sama seperti di Matraman, Benhil, Johar Baru dan seterusnya. Kasus tawuran pelajar juga masih sering terjadi dilatar belakangi saling ejek di Medsos maupun tradisi atau desakan senior. Kasus terorisme seperti pengungkapan dan penangkapan pelaku terorisme banyak terjadi wilayah penyangga DKI Jakarta.

i) Kalender Kamtibmas 2026

1. Januari

- Tgl 1 : Tahun Baru Masehi
- Tgl 4 : HUT Kemerdekaan Myanmar
- Tgl 5 : HUT PPP
- Tgl 10 : Hari Tritura, Hari Lingkungan Hidup, HUT PDIP
- Tgl 15 : Peristiwa Malari
- Tgl 16 : Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
- Tgl 26 : HUT Kemerdekaan Australia

Tgl 31

- Tgl 31 : HUT NU (Nahdlatul Ulama)
- 2. Februari
 - Tgl 5 : HUT HMI
 - Tgl 6 : HUT FSPMI, HUT Partai Gerindra
 - Tgl 8 : Peristiwa Bentrok Wadas
 - Tgl 17 : Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
 - Tgl 20 : HUT KSPI, HUT Pekerja Nasional
- 3. Maret
 - Tgl 1 : Peristiwa Serangan Umum 1 Maret
 - Tgl 8 : Hari Perempuan Internasional
 - Tgl 11 : Peringatan Supersemar
 - Tgl 19 : Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948
 - Tgl 20 : HUT Kontras
 - Tgl 21 : Hari Penghapusan Diskriminasi
International / Hari Raya Idul Fitri 1447 H
 - Tgl 22 : Hari Air Sedunia
- 4. April
 - Tgl 3 : Peringatan Wafat Isa Almasih / Jumat Agung
 - Tgl 6 : Hari Nelayan Nasional
 - Tgl 20 : Paskah / HUT PKS
 - Tgl 21 : Hari Kartini
 - Tgl 25 : HUT RMS, HUT KASBI
 - Tgl 26 : Hari HAKI Internasional
- 5. Mei
 - Tgl 1 : Hari Buruh Sedunia / May Day
 - Tgl 2 : Hari Pendidikan Nasional
 - Tgl 8 : Hari Palang Merah Sedunia
 - Tgl 12 : Peristiwa Tragedi Trisakti
 - Tgl 14 : Kenaikan Isa Almasih
 - Tgl 20 : Hari Kebangkitan Nasional

Tgl 21

- Tgl 21 : Peristiwa Reformasi
- Tgl 27 : Berdirinya Ahmadiyah / Hari Raya Idul Adha 1447H
- Tgl 31 : Hari Anti Tembakau Sedunia / Hari Raya Waisak 2570 BE

6. Juni

- Tgl 1 : Hari Lahirnya Pancasila
- Tgl 5 : Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Tgl 6 : Hari Lahir Bung Karno
- Tgl 17 : Tahun Baru Hijriyah 1448 H
- Tgl 22 : HUT DKI Jakarta
- Tgl 24 : Hari Bidan Nasional

7. Juli

- Tgl 1 : Hari Bhayangkara
- Tgl 4 : Hari Kemerdekaan Amerika Serikat
- Tgl 12 : Hari Koperasi
- Tgl 22 : Hari Kejaksaan RI
- Tgl 23 : HUT KNPI, HUT PKB, Hari Anak Nasional
- Tgl 26 : Peringatan Malam 27 Juli
- Tgl 27 : Tragedi 27 Juli 1996
- Tgl 29 : Milad FBR
- Tgl 31 : HUT Serikat Pekerja UTP Koja

8. Agustus

- Tgl 5 : Peristiwa Bom Marriot 2003
- Tgl 8 : Hari ASEAN
- Tgl 10 : Hari Veteran Indonesia
- Tgl 13 : Peristiwa Berdirinya Serikat Tani
- Tgl 14 : Hari Pramuka
- Tgl 16 : Pidato Kenegaraan Presiden RI
- Tgl 17 : HUT Kemerdekaan RI, Milad FPI

Tgl 18

- Tgl 18 : Hari Konstitusi RI
 - Tgl 25 : Maulid Nabi Mumahhad SAW
9. September
- Tgl 1 : HUT Polwan
 - Tgl 7 : Peringatan Meninggalnya Munir
 - Tgl 9 : HUT Partai Demokrat, Peristiwa Bom Kedubes Australia
 - Tgl 12 : Peristiwa Tanjung Priok
 - Tgl 17 : Hari Perhubungan Nasional, Hari PMI
 - Tgl 23 : Hari Bahari
 - Tgl 24 : Hari Tani Nasional, Peringatan Peristiwa Semanggi II
 - Tgl 31 : Peristiwa G 30 S/PKI
10. Oktober
- Tgl 1 : Hari Kesaktian Pancasila, HUT Tiongkok, Tragedi Kanjuruhan
 - Tgl 5 : HUT TNI
 - Tgl 9 : HUT UPC (Buruh Migran)
 - Tgl 16 : Hari Pangan Sedunia
 - Tgl 20 : Hari Santri Indonesia, HUT Golkar
 - Tgl 20 : Peringatan Pelantikan Presiden terpilih
 - Tgl 24 : Hari Dokter Indonesia
 - Tgl 27 : Hari Listrik Nasional
 - Tgl 28 : Hari Sumpah Pemuda
11. November
- Tgl 4 : Giat 411 oleh Alumni 212
 - Tgl 10 : Hari Pahlawan, Peristiwa Terbunuhnya They 2001
 - Tgl 12 : Hari Kesehatan Nasional
 - Tgl 13 : Peristiwa Semanggi I Tahun 1998
 - Tgl 14 : HUT Brimob

Tgl 18

- Tgl 18 : HUT Muhammadiyah
- Tgl 20 : Hari Anak Internasional
- Tgl 21 : Hari Pohon Nasional, Hari Trans Gender
- Tgl 22 : Hari Perhubungan Darat
- Tgl 25 : HUT PGRI
- Tgl 29 : HUT KORPRI

12. Desember

- Tgl 1 : HUT OPM, Hari AIDS Sedunia
- Tgl 2 : Giat 212 Alumni 212
- Tgl 6 : HUT Polres Metro Jakarta Selatan
- Tgl 7 : Kematian 6 Laskar FPI
- Tgl 9 : Hari Anti Korupsi
- Tgl 10 : Hari HAM Internasional
- Tgl 14 : Hari Melanesia
- Tgl 19 : Peringatan Trikora, Hari Aneksasi Papua ke dalam NKRI
- Tgl 22 : Hari Ibu, Hari Sosial
- Tgl 25 : Hari Natal
- Tgl 31 : Perayaan Malam Tahun Baru

j) kalender kegiatan tahunan masyarakat Jakarta

- (1) Karnaval Kemerdekaan / *Grand Karnaval Indonesia*;
- (2) *Jakarta International Java Jazz Festival*;
- (3) *Jakarta Fashion Week*;
- (4) Jakarnaval;
- (5) *Car Free Night*;
- (6) Jakarta Muharam Festival dan pawai obor;
- (7) Kegiatan Tabligh Akbar;
- (8) *Djakarta Warehouse Project*;
- (9) *Jakarta Food & fashion Festival*;

- (10) Parade Tauhid;
- (11) Pekan Raya Jakarta;
- (12) *We The Festival*;
- (13) Jakarta Marathon;
- (14) *Wonderful Indonesia Culinary and Shopping Festival*
- k) kerawanan kota yang perlu mendapat perhatian
 - (1) pengerahan massa terkait kebijakan pemerintah;
 - (2) premanisme;
 - (3) keributan antar kelompok Ormas, perkelahian pelajar dan warga;
 - (4) kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah yang berdampak pada masyarakat;
 - (5) Ketidaktertiban lalu lintas yang berdampak pada terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - (6) pergerakan/mobilisasi massa dalam jumlah besar baik dalam bentuk kegiatan organisasi maupun kegiatan aksi unjuk rasa;
 - (7) kejahatan dengan menggunakan senpi rakitan dengan sasaran nasabah bank, mini market, pengendara roda dua;
 - (8) kegiatan aksi teror, baik dengan ancaman bom, ledakan bom maupun serangan terhadap pejabat, aparatur pemerintah, aparat keamanan dengan menggunakan senjata api, Sajam dan benda-benda berbahaya lainnya.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi berasal dari "*faktor internal dan eksternal*" sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan

dan

dan strategi. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas profesionalisme dari Sumber Daya Manusia (SDM) Polres Metro Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugasnya, di samping itu meningkatnya volume tugas terhadap kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dalam mendukung pembangunan nasional sehingga berdampak perlu diusulkannya untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisi *eksternal* yang dihadapi saat ini antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu, perkembangan teknologi informasi yang semakin signifikan dimana digitalisasi dan penggunaan *AI* berdampak hadirnya informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan. Pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan seperti *spamming*, *phising* dan *hacking*. Dengan adanya *AI* dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber), transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan penyalahgunaan teknologi informasi dengan hadirnya pinjol maupun judol yang merusak norma dan tatanan masyarakat. Di mana meningkatnya penggunaan *artificial intelegent* berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Usaha jasa layanan informasi dan transaksi bisnis melalui internet dan telepon selular semakin berkembang, sementara ketentuan atau aturan tentang perlindungan jasa konsumen terkait bidang tersebut belum memadai, masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri sebagai akibat dari kesadaran hukum masyarakat serta masih lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, sehingga

berdampak

berdampak buruk terhadap penegakkan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan kejahatan seperti: terorisme, korupsi, Narkoba, PPA, TPPO, penyelundupan barang, judi *online* dan siber serta menuntut Polri untuk lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum yang akan menjadi fokus pada tahun 2026. Semakin menipisnya kohesifitas masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan upaya pendekatan hukum untuk menyelesaikan setiap kejadian. Banyaknya kasus hukum, korupsi, kejahatan siber serta masih ditemukannya Yanlik Polres Metro Jakarta Selatan yang masih belum sesuai SOP akan berpengaruh terhadap kinerja Polres Metro Jakarta Selatan. Semakin meningkatnya kejahatan transnasional terkait dengan semakin tidak jelasnya batas negara dan perang dagang yang terjadi antar negara saat ini sehingga lalu lintas orang dan barang ilegal semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polres Metro Jakarta Selatan saat ini seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat tantangannya dan semakin kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Selatan yang semakin tinggi mengharuskan Polres Metro Jakarta Selatan menyusun berbagai langkah strategis dan upaya serta langkah-langkah aksi yang konkrit dan efektif dalam mewujudkan "Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib, dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat". Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi oleh Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a) adanya pergeseran pusat gravitasi geostrategis dunia dari Trans Atlantik ke Asia Pasifik. Kondisi ini cukup beralasan karena Asia Pasifik merupakan lokasi negara-negara penggerak ekonomi dunia. Lebih dari 41% penduduk dunia tinggal di kawasan ini

dan

dan 50% transaksi perdagangan dunia berada di kawasan ini. Aktivitas perdagangan dan konektivitas antar negara sangat dinamis sehingga banyak negara membangun kerja sama di kawasan ini;

- b) isu lingkungan hidup dan perubahan iklim menjadi fokus perhatian karena telah mengancam keamanan umat manusia terutama untuk menghirup udara bersih, mendapatkan air bersih serta keamanan yang sangat dimungkinkan memunculkan krisis multidimensional dan wabah baru;
- c) pemulihan ekonomi global baik dari konsumsi dan produksi secara gradual mulai meningkat, meskipun belum pulih sempurna. Meskipun IMF memprediksi sampai tahun 2026 belum pulih, namun negara-negara Asia akan lebih lambat pulih dengan adanya pergeseran gravitasi ekonomi dunia pada perang dagang dan tarif yang terjadi saat ini;
- d) hubungan internasional negara-negara semakin memasuki pola hubungan yang bersifat *zero sum*, di mana negara saling berkompetisi untuk dapat memenuhi kebutuhan domestiknya masing-masing, mencoba mengurangi ketergantungan dari pihak luar, secara agresif mengamankan dirinya dari paparan dunia luar, meninggalkan institusi internasional dan pendekatan multilateral, serta melakukan tindakan- tindakan yang lebih mengarah kepada unilateralisme yang difokuskan kepada kepentingan pribadinya;
- e) perang dagang dan tarif yang terjadi saat ini antara AS dan Cina serta negara lainnya berpengaruh pada perdagangan dunia;
- f) trend deglobalisasi yang mengarah kepada *proteksionisme* harus disikapi dengan hati-hati karena pernah gagal membendung Depresi Besar di tahun 1930 dan hanya memperburuk keadaan pada masa Perang Dunia II;

g) isu

- g) isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2026;
- h) konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi pada masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- i) transformasi digital dan kesenjangan digital masyarakat akan menimbulkan informasi asimetris yang berakibat pada segregasi, konflik dan kekerasan;
- j) pemanfaatan teknologi banyak mengarah pada kejahatan siber seperti *spamming, phising dan hacking*;
- k) penyesuaian program, kebijakan dan anggaran serta penataan lembaga negara menjadi fokus pemerintah 2026;
- l) kasus-kasus hukum yang dianggap mengganggu rasa keadilan masyarakat tampak masih akan menjadi perbincangan publik melalui *"berita viral"*;
- m) sejumlah peraturan perundangan yang dianggap bermasalah/ menghambat, akan ditinjau dan dikoreksi;
- n) penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi dan mewarnai di tahun 2026, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- o) menguatnya kepentingan elit politik dalam perubahan konfigurasi politik memunculkan segregasi yang dapat memicu adanya konflik

horizontal

horizontal. Di samping koalisi pemerintah yang semakin solid seiring dengan upaya pembenahan dan harmonisasi kelembagaan;

- p) keberadaan dan kegiatan kelompok teroris di Indonesia masih tetap tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara sporadis termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah;
- q) masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalu lintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan jumlah kendaraan yang semakin meningkat yang tidak selaras/berbarengan dengan perkembangan dan penambahan sarana prasarana jalan;
- r) gangguan Kamtibmas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;
- s) masih kurangnya pengawasan dan tanggungjawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
- t) masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas sehingga gangguan Kamtibmas berupa: kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalu lintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, khususnya di kota-kota besar serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;

u) rendahnya

- u) rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, serta masih tingginya konflik sosial, aksi premanisme oleh ormas, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat perlu penanganan secara komprehensif;
- v) cepatnya perkembangan teknologi digital ditengah masyarakat yang sangat cepat, Polres Metro Jakarta Selatan dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- w) semakin meningkatnya kejahatan berdimensi baru yang membutuhkan pengetahuan dan penanganan SC/ yang berbeda;
- x) kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus terjadi dan perlu ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM serta membutuhkan penanganan khusus;
- y) penyelundupan barang dan orang, pencurian terhadap sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak lingkungan serta ketahanan dan keamanan pangan;
- z) penyalahgunaan Narkoba dan obat terlarang masih mewarnai Indonesia ditahun 2026 disamping berkaitan erat dengan maraknya perjudian *online*, serta kejahatan jalanan (*street crime*);
- aa) panjangnya jalur perbatasan dan adanya pulau-pulau terluar yang belum berpenghuni, sangat berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas penyelundupan barang dan orang dan rawan terjadi aneksasi pulau/wilayah Indonesia oleh pihak asing masih perlu mendapatkan perhatian dan pengamanan khusus dari Polri.

II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

Polri

a. Visi:

Terwujudnya Indonesia Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan, melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.

b. Misi

- b. Misi:
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.
- 2. Visi dan Misi Polres Metro Jakarta Selatan
 - a. Visi:
Terwujudnya daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan Maju yang Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada Masyarakat.
 - b. Misi:
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan.
- 3. Tujuan Jangka Menengah
 - a. Nasional
Tujuan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 bidang pertahanan dan keamanan yaitu "Terjaganya Kedaulatan Negara dan Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional sebagai Fondasi Pelaksanaan Pembangunan" Adapun tema Pembangunan tahun 2026 yaitu: "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan 2 (dua) fokus arah kebijakan yang meliputi: kedaulatan pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif.
 - b. Polri
Adapun tema pembangunan Polri Tahun 2026 adalah "Polri Siap Mendukung Program Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan tujuan:
 - 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
 - 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu

mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;

- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan profesional, berintegritas dan adaptif melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional Kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih(*Good Governance and Clean Government*) pada Polri.

c. Polres Metro Jakarta Selatan

Adapun tema pembangunan Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2026 adalah "Polres Metro Jakarta Selatan Siap Mendukung Program Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif" dengan tujuan:

- 1) menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil dan tertib dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara Responsif dan Prediktif;
- 2) meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polres Metro Jakarta Selatan yang berintegritas, modern dan akuntabel dengan mengutamakan keadilan, transparansi dan perlindungan hak asasi manusia serta mampu menjalankan peran utamanya dalam menegakkan hukum, melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan negara dengan cara yang lebih profesional, responsif dan adaptif;

3) meningkatkan

- 3) meningkatkan kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Metro Jakarta Selatan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Kepolisian dengan profesional, berintegritas dan adaptif melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4) membangun dan mengembangkan infrastruktur strategis Kepolisian yang mendukung operasional Kepolisian yang efisien dan terintegrasi, pemeliharaan Kamtibmas yang optimal pelayanan publik yang berkualitas, penegakan hukum yang lebih profesional sehingga dapat mendukung kinerja Polres Metro Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal;
- 5) memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Polres Metro Jakarta Selatan.

3. Sasaran Prioritas

a. Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Proyek Prioritas Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen dan Penanggulangan Terorisme;
- 2) Proyek Prioritas Penguatan Keamanan Laut dan Hidro-Oseanografi;
- 3) Proyek Prioritas Penguatan Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal;
- 4) Proyek Prioritas Penguatan Keamanan dan ketertiban Masyarakat;
- 5) Proyek Prioritas Penguatan Keamanan Insani, Pelindungan WNI dan BHI, Keimigrasian dan Narkoba.

b. Polri

b. Polri

Sasaran Prioritas Polri pada tahun 2026 yang terdapat pada surat edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) pertama "Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Indonesia secara Responsif dan Prediktif";
- 2) kedua "Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Berkualitas dan Terintegrasi";
- 3) ketiga "Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan";
- 4) keempat "Mewujudkan SDM Polri yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan";
- 5) kelima "Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian";
- 6) keenam "Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik".

c. Polres Metro Jakarta Selatan

Sasaran Prioritas Polres Metro Jakarta Selatan pada tahun 2026 yang terdapat pada surat edaran tentang Penjabaran Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) pertama "Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di seluruh Wilayah Indonesia secara Responsif dan Prediktif";
- 2) kedua "Mewujudkan Pelayanan Publik Polres Metro Jakarta Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi";
- 3) ketiga "Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan";

4) keempat

- 4) keempat "Mewujudkan SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan";
- 5) kelima "Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian";
- 6) keenam "Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik".

III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2026

1. Program Prioritas Nasional

Sebagai penjabaran "Program Asta Cita" diprogram prioritas nasional ke-2 (dua) tahun 2026 dalam rangka Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (Asta Cita 2) dan Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (Asta Cita 7). Sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau *supporting* dari Kementerian/Lembaga terkait.

2. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2026

- a. Sasaran Prioritas I "Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Indonesia secara Responsif dan Prediktif" terdiri dari 11 (sebelas) arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

2) meningkatkan

- 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
- 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 5) mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- 6) meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- 7) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*Slum Area*";
- 8) melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan *event* nasional/ internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026;
- 9) melaksanakan "*back up*" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
- 10) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- 11) melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut;

12) meningkatkan

- 12) meningkatkan penguatan kehadiran Polri dalam pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar berpenghuni.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi Kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat
(*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- b) mengoptimalkan kegiatan penyelidikan dengan fokus pada potensi terjadinya tindak pidana terorisme, ancaman aksi radikalisme dan pemetaannya
(*giat3143/progLidikSidik/SP1/SS2/IKU8*);
- c) penguatan program Polmas guna menumbuhkan kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi

masyarakat

masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*)(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d) meningkatkan kualitas hasil penelitian dan survei yang akuntabel dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Kamtibmas Polri(*giat5067/progDukma/SP1/SS5/IKP1*).

- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input* (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
- b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait); (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*).

- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif.

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tujuh strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah

kejahatan

kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat

(*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- b) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal- kanal media *online* maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme
(*giat3143/progLidiksidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU9*);
- c) meningkatkan dan menciptakan pendekatan adaptif kepada masyarakat dengan melibatkan peran *civil society* dan tokoh agama yang telah mengikuti program moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme
(*giat3143/progLidikSidik/giat3128,5076/progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU9*);
- d) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kolaborasi dengan "*stakeholder*" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap eks napi terorisme beserta keluarganya
(*giat3143/progLidikSidik,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/ IKU9*);
- e) meningkatkan kegiatan menetralsir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri
(*giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
- f) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "edukasi" dan himbauan kepada masyarakat berupa mendukung dan mensukseskan program pemerintah serta pesan

Kamtibmas

Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri

(*giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);

- g) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata (*giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*).

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*) serta menyukseskan program ketahanan pangan (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengembangan kewenangan fungsi Kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan

mengoptimalkan

mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP

(*giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi *ISDC* sebagai pusat unggulan pelatihan *safety driving* dan kampanye budaya tertib lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan (*giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1*).

- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis.

Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- c) meningkatkan respons cepat penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*).

- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan.

Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawasan dan

patroli

patroli ditengah masyarakat guna mengurangi angka kecelakaan serta mengamankan jalur distribusi pangan
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan

Kamtibmas

(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif" serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan

Kamseltibcarlantas

(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*).

- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*Slum Area*". Untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kesiapsiagaan personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi "ketanggapsegeraan" dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah (*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- b) meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan *Search and Rescue (SAR)* terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan

yang.....

yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa

(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "*Bhabinkamtibmas*" yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan "pelayanan kesehatan" dan "*trauma healling*" pada daerah rawan gempa dan bencana (*giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSD M/ SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1*);

- 8) arah bijak: melaksanakan tahapan pengamanan kegiatan event nasional/internasional serta pembangunan Ibu Kota Negara baru tahun 2026.

Untuk mewujudkan arah bijak 8, maka terdapat tujuh strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan respons yang cepat dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi Kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta tahapan saat event nasional/internasional berlangsung (*giat5079,5080,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);

b) melaksanakan

- b) melaksanakan perencanaan operasi Kepolisian dalam rangka pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat5079/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
- c) melaksanakan operasi Kepolisian dan pengamanan *event* nasional tahun 2026 meliputi: Provinsi Gorontalo terpilih sebagai tuan rumah Pekan Nasional (Penas) Tani Nelayan ke XVII Tahun 2026, Gelaran Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XI yang berlangsung di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) memberikan kesan tersendiri bagi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). Perguruan Tinggi LPTK di Bali ini didaulat menjadi tuan rumah untuk gelaran yang sama pada tahun 2026 atau Konaspi ke-XII. dan pengamanan *event* internasional 2026 meliputi: penyelenggaraan *World Boomerang Championships*, *Busworld South East Asia* Mei 20-22 2026; kejuaraan *World Archery Cup Series* 2026 dan *World Archery Asia Cup Series* 2026 di Bali; *World Science Forum (WSF)* Indonesia akan menjadi tuan rumah *WSF* ke-12; *Asian Futsal Cup (AFC)* Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Asia Futsal; *World Rally Championship (WRC)* Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk ajang balap *WRC*; *Hash International (Interhash)* Indonesia kembali menjadi tuan rumah *Interhash*; *International Conference for International Studies (ICON-IR)* Universitas Katolik Parahyangan berencana menyelenggarakan konferensi *ICON-IR* pada 4-5 Agustus 2026; *GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC)* akan diselenggarakan di *Jakarta Convention Center*; Konferensi Perdamaian Internasional, Indonesia berpotensi menjadi tuan rumah

rumah Konferensi Perdamaian Internasional dan *TAFISA Games*: Kemenpora ingin memastikan semua negara ASEAN siap menyelenggarakan *TAFISA Games*(*giat3143,5079,5087,3130,3133/progSidikLidik,progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU8*);

- d) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional tahun 2026 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawalan (*giat,3130/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - e) menyelenggarakan pengamanan objek vital di lokasi *event*(*giat3130,3131,3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/KU5*);
 - f) melaksanakan pengamanan *event* nasional tahun 2026 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala ke intensitas tinggi (*giat3143,5087/progSidikLidik,progHarkamtibmas/SP1/ S S1/IKU6*);
 - g) meningkatkan pelaksanaan pengamanan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (*giat3130,3133,5079,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1 /IKU8*).
- 9) arah bijak: melaksanakan "*back up*" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana.
- Untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat lima strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka

back

"*back up*" pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik

(*giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- b) meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif

(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);

- c) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- d) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);

- e) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba (*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*).

- 10) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum.

Untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergisitas dengan "*stakeholder*" terkait (*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama internasional guna mendukung kerja sama Kepolisian internasional, organisasi internasional dan kerja sama bilateral serta multilateral dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan citra positif Polri/ Indonesia di mata internasional(*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);
 - c) meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban internasional di wilayah perbatasan NKRI (*giat3122/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*).
- 11) arah bijak: melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal dan pesawat udara Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung kegiatan keamanan laut.
- Untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli kapal Polri dan “*back up*” di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum (*giat3134,4342/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);
 - b) meningkatkan pelaksanaan kegiatan “*back up*” patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah perairan yang rawan kejahatan (*giat3135/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);
 - c) meningkatkan kegiatan pengamanan pada jalur niaga di seluruh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*).
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari tiga arah bijak sebagai berikut:

1) meningkatkan

- 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
- 2) meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri;
- 3) meningkatkan "*ketanggap segera*" dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, Harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda. Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau media sosial guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit* (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya (*giat3089,3091,5086/progLidikSidik,Dukma/SP2/SS2/IKU9/ SS5/IKP7*).
- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna

meniadakan

meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat tujuh strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat melalui penguatan SuperApp, e-SIM, Samsat Digital, dan integrasi basis data kendaraan serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik Kepolisian (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor perluasan layanan daring, interoperabilitas sistem (SIM, STNK, tilang), dan pembaruan infrastruktur digital (*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071,5055/progDukma/ SP2/SS1/IKU1*);
- c) meningkatkan inovasi layanan yang adaptif bagi masyarakat serta efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi *afirmatif* (menguatkan) di kawasan perbatasan (*giat3133,3071,3084,5055/progHarkamtibmas,progDukma/ SP2/SS1/IKP4b*);
- d) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolri.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polri dimata masyarakat (*giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);

e) meningkatkan

- e) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online (*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);
 - f) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran (*giat3072/progDukma/SP2/SS1/IKU*);
 - g) meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional BUJP (*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2*).
- 3) arah bijak: meningkatkan "*ketanggapsegeraan*" dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polri, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespons aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit- belit(*giat4340,5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4*);
- b) meningkatkan "*Respons Time*" dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban (*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3*);
- c) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5*).

c. Sasaran

c. Sasaran Prioritas III "Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan" terdiri dari empat arah bijak sebagai berikut:

- 1) mengedepankan kolaborasi dan kerja sama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri;
- 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;
- 4) meningkatkan peran adaptivitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan di pusat data dan informasi kriminal nasional.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat sebelas strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia (*giat3134,4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7*);
- b) meningkatkan kegiatan penyelidikan dari ancaman tindak pidana terorisme, dan melaksanakan penindakan serta penyidikan terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*giat3143/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);

c) meningkatkan

- c) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak (*giat3140,3142,3143,3144,3151,3145,3146,5083,progLidik Sidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);
- d) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanian, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan)(*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);
- e) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut (*giat4342/progLidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- f) melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penanganan/ penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas melalui integrasi kamera Pemda, *private sector* dan pelatihan personel dalam rangka mewujudkan "*Road Safety*" serta penegakkan hukum melalui "*ETLE*" dan tilang manual (*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progLidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6*);
- g) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui "*Restorative Justice*" yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU8*);
- h) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat

giat

(giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2);

i) melaksanakan penindakan hukum terbatas/Tipiring dalam menjaga Harkamtibmas
(giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);

j) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara- perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat
(giat3142,3143,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU 9);

k) meningkatkan pemberian bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(giat3140,3141/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb).

2) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polri.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

a) meningkatkan kualitas sertifikasi bagi penyidik Polri
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2);

b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara
(giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2).

3) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna

meminimalisir

meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka (*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);

b) mengoptimalkan peran "*Waskat*" dari atasan penyidik dan peran dari Wassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku(*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8*);

c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri (*giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*).

4) arah bijak: meningkatkan peran adaptifitas penanganan kejahatan Polri melalui pusat analisis tindak kejahatan di pusat data dan informasi kriminal nasional.

Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

a) meningkatkan transparansi dan efisiensi penanganan perkara melalui SOP dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi(*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*);

b) melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan standardisasi data kriminal nasional (melalui *Integrated Smart Criminal Information System*) (*giat5084/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa*).

d. Sasaran

d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polri yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari enam arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;
- 2) mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
- 3) mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
- 5) melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang system manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
- 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polri yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat sembilan strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas dan mutu hasil dari lulusan Diklat Polri agar sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tugas Polri kedepan

giat

- (*giat5068,5069/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*)
- b) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);
- c) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi "*Negosiator dan Dalmas*" yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);
- d) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "*Menjunjung Tinggi HAM*" dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100,5076,3130,5087/progProfesionalismeSDMPolri, progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/SS3/IKP2*);
- e) meningkatkan kualitas dan *kapasitas* SDM Siber Polri, serta digital forensik yang "*Profesional*" dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas serta mendukung pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100,3151,3141/progProfesionalismeSDMPolri,Lidik Sidik/SP4/SS2/IKU1/IKU2/SS3/IKP2*);
- f) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);

g) meningkatkan

- g) meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polri dan ASN Polri guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima (*giat3100,4341/progProfesionalismeSDM,progModernisasi AlmatsusSarprasPolri/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP*);
 - h) melaksanakan peningkatan kualitas kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel kedokteran Kepolisian melalui seminar/*workshop* (*giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP2*);
 - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi dan keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi (*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKP2*).
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna *SPBE*.
- Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP1*);
 - b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polri, dengan tujuan meningkatkan

efisiensi dan efektivitas pelayanan Polri yang berkualitas dan terpercaya. (*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4*);

- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polri yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”. Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat delapan strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) memperluas dan menyempurnakan kapabilitas Polri dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan *eksternal* dan *internal* sebagai sumber calon personel) (*giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - b) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali “*Employee Value Proposition*” (EVP) Polri (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - c) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi Pegawai Negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir

kelompok

kelompok berkebutuhan khusus serta berbasis teknologi informasi dengan sistem *zero growth* untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2026 sebanyak Penerimaan Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) sebanyak 10.000 orang dengan rincian: Akpol sebanyak 350 orang, SIPSS sebanyak 150 orang, Bintara Polri sebanyak 8.000 orang, Tamtama Polri sebanyak 1.000 orang dan ASN 500 orang

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- e) melaksanakan seleksi Dikbang Pegawai Negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2026 sebanyak 19.821 orang terdiri dari: Lemhanas 70 orang, Sespimti 100 orang, Sespimmen 250 orang, SPPK (Susjemenstra) 75 orang, S-2 KIK-UI 20 orang, S-3 Kriminolog 10 orang, S-2 MSDM 20 orang, S-3 STIK- PTIK 20 orang, S-2 STIK-PTIK 30 orang, S-1 STIK-PTIK Lanjutan Akpol 200 orang, S-1 STIK-PTIK Reguler Ba Polwan 30 orang, Sespimma 300 orang, Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 3.000 orang, Pendidikan Alih Golongan (PAG) 1.500 orang, Sekolah Bintara Polisi (SBP) 500 orang, Intel LN 60 orang, UDKP/I PNS 300 orang, PKN I 40 orang, PKN II 70 orang, PKA 120 orang, PKP 120 orang, Dikbangspes 12.986 orang
- (giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);*
- f) melaksanakan kegiatan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;

(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- g) melaksanakan kegiatan pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang adaptif untuk menjadi teladan, melayani dan transformatif
(giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1);

- h) mengelola kesiapan personel Polri sebanyak 1.667 Personel yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap
(giat3108/progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP1).

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri.

Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melaksanakan dan melanjutkan rintisan dan perpanjangan *MoU* kermadik Dagri dan Lugri
(giat3104/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2);

- b) meningkatkan dan melanjutkan kerja sama dengan Lembaga/ Asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri
(giat3100,3120,3122/progProfesionalismeSDMPolri,pr og Harkamtibmas/SP4/SS1/IKU8/SS3/IKP2);

- c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta *clear and clean* dengan menggunakan *Computer Asisted Test (CAT)* di tingkat Polda*(giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1).*

- 5) arah bijak: melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*).

Untuk

Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melanjutkan penyempurnaan standard penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan “*sistem reward and punishment*” serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta” (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
 - d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus (*giat3100,5076/progProfesionalismeSDMPolri,progHarkamtibmas/ SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2*).
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat
(*giat3072/progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/SP4/S3/ IKP1*);
- b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly*
(*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS3/IKP1*);
- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polri, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI
(*giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- d) melanjutkan kegiatan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(*giat3072,5062/progDukma,ModernisasiAlmatsusSarpas Polri/SP4/SS4/IKP2*).
- e. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari lima arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)

2) mendorong

- 2) mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional;
- 3) meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan;
- 4) melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap;
- 5) melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SCI; mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat lima belas strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melanjutkan kegiatan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara *online* (*giat5062,3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
- b) pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan

(giat5060,3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5 / SS4/IKP2);

- c) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK *online*
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- d) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan Indonesia *Safety Driving Center* di kewilayahan
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- e) meningkatkan kualitas pembangunan *RTMC/TMC* di kewilayahan
(giat5060,5062,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri 2, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- f) mengoptimalkan pemasangan *ETLE* guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya
(giat5060,3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2);
- g) mengoptimalkan Faskes dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah serta memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota Polri dan masyarakat umum
(giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP 5/SS4/IKP1);
- h) melaksanakan kegiatan Litbang guna membuat *prototype* peralatan Polri yang berbasis teknologi dan inovasi teknologi Kepolisian terkini

(giat5067,5060,3084/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP3);

- i) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah perbatasan, pulau terluar dan wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas
(giat5055,5060,3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- j) melanjutkan kegiatan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE)
(giat5060,5051/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2); (G.S)
- k) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama(RPJMN)*(giat5060,3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);*
- l) pemenuhan Almatsus Polri berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi hijau (RPJMN)*(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);*
- m) pemenuhan Almatsus/Alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2026, perbatasan dan destinasi wisata
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);
- n) mendukung pemenuhan alat mesin pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional
(giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);

o) meningkatkan

- o) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) (G.S) (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*).
- 2) arah bijak: mendorong dan meningkatkan pemenuhan Almatsus Polri melalui peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) dan industri swasta nasional.
Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) melanjutkan kerja sama dalam pembuatan *prototype* dengan BUMNIS dan Industri Swasta Nasional (ISN), sesuai standarisasi dan sertifikasi Alpalkam dan Almatsus Polri (*giat5060/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - b) meningkatkan dan memperhatikan penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap pelaksanaan pengadaan Almatsus dan Alsus Polri (*giat4341/progModernisasiAlmasusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*).
- 3) arah bijak: meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong pembangunan rumah dinas termasuk di wilayah perbatasan. Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat enam strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) memonitor pembangunan fasilitas kantor Polri di IKN dan rencana pembangunan Mako Polda Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Yogyakarta (*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - b) meningkatkan

- b) meningkatkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri *(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2)*;
 - c) mengoptimalkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (FKTP/poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung "Sistem Kesehatan Nasional" *(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2)*;
 - d) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran (Polres/ Polsek) dan Rumdin serta mempercepat pembangunan di Wilayah Perbatasan secara selektif prioritas dan berkelanjutan *(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2)*;
 - e) mendukung pemenuhan Gudang ketahanan pangan Polri dalam rangka ketahanan pangan nasional *(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2)*;
 - f) mendukung pemenuhan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat *(giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2)*.
- 4) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan laboratorium forensik di kewilayahan secara bertahap.
- Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

a) melaksanakan

- a) melaksanakan pemetaan laboratorium forensik berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam pemenuhan sarana prasarana
(*giat3141,5062/progLidikSidik,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - b) melanjutkan pemenuhan bangunan laboratorium forensik beserta dukungan rumah dinasnya di tingkat kewilayahan dalam rangka mendukung percepatan pengungkapan kasus tindak pidana
(*giat5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*).
- 5) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus *SCI*. Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat strategi yang akan dilakukan, yaitu:
melaksanakan kegiatan pemetaan dan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini
(*giat3140,3084/progSidikLidik,progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP5/SS4/IKP2*).
- 6) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) keberlanjutan pelaksanaan roadmap digitalisasi Korlantas, seperti penguatan *superApp*, e-SIM, Samsat Digital, dan integrasi basis data kendaraan
(*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*)
 - b) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi Kepolisian secara

secara bertahap yang terintegrasi

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2);

- c) meningkatkan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (melalui, *hotline*, *police superApp*, *whatsapp for business*, dan lain-lain) serta penataan infrastruktur layanan darurat/*hotline* Kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat

(giat5055,5062/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP5/SS4/IKP2);

- d) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi Kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan *(giat3084,5067/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,prog Dukma/SP5/SS4/IKP2).*

- f. Sasaran Prioritas VI “Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik” terdiri dari enam arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi Kepolisian dan masyarakat; (G.S)
- 2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
- 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang
Transparan.....

transparan dan akuntabel;

- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi Kepolisian dan masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis TI (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
- b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
- c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis TI (*giat3091,3089/progDukma/SP6/SS5/IKP7*).

- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polri guna menjaga citra positif Polri di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat enam strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan

- a) meningkatkan kegiatan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *hotline*, *police superApp*, *Police website*, dan *social media* (*giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS (*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 (*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
 - f) melaksanakan "operasi bersih" di internal dan di sentra pelayanan publik Polri baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK); (*giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5*).
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri dalam rangka *Good Government and Clean Governance*.

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di

di tubuh Polri melalui Aplikasi *Whistle Blower System* (WBS), serta bersinergisitas dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi (*giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);

- b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*).

- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat lima strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan (*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
- b) meningkatkan sinergisitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja Polri dan Renja Polri) agar selaras pembangunan di lingkungan Polri dan semakin berkualitas (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
- c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi

fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker(*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);

- d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan (*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional (*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*).
- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) melaksanakan Monev atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta Monev hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) (*giat4339,5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya termasuk monitoring hasil pemekaran wilayah Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya (*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - c) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru guna mendukung IKN

giat

(giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1).

- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik. Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat delapan strategi yang akan dilakukan yaitu:

- a) melaksanakan Bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);

- b) melaksanakan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polri pada Mabes/Polda/Polres/Polresta/Polrestabes/Polresmetro untuk meningkatkan indeks pelayanan publik Polri*(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKP4);*
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri *(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);*

d) peningkatan

- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polri (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- e) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- f) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polri guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- g) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*).
- h) sebagai *quality insurance* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yang sudah berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan peredikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM. (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*).

3. Sasaran Prioritas, Arah Kebijakan dan Strategi Polres Metro Jakarta Selatan Tahun 2026

- a. Sasaran Prioritas I "Menjaga dan Memelihara Kamtibmas di Seluruh Wilayah Indonesia secara Responsif dan Prediktif" terdiri dari sepuluh arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kinerja Polres Metro Jakarta Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat

masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri;

- 2) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen;
- 3) mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif;
- 4) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;
- 5) mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis;
- 6) meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan;
- 7) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polres Metro Jakarta Selatan ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*Slum Area*";
- 8) melaksanakan "*back up*" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana;
- 9) meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum;
- 10) melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal di seluruh daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan guna mendukung kegiatan keamanan laut.

Dengan

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polres Metro Jakarta Selatan sebagai bagian dari penguatan fungsi intelijen dalam melaksanakan deteksi aksi dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan dalam negeri.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi: deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polres Metro Jakarta Selatan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi Kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat (*giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU7*);
 - b) penguatan program Polmas guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*)(*giat3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- 2) arah bijak: meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan lingkungan dalam negeri melalui mengoptimalkan pengumpulan data intelijen.

Untuk

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan repositori data terpadu yang mengintegrasikan berbagai sumber *input* (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui *data-sharing platform* (termasuk notifikasi potensi ancaman kepada fungsi terkait) (*giat3112/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU7*).
- 3) arah bijak: mengendalikan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang responsif.

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan dan mengembangkan program berorientasi masyarakat (*community-based program*) untuk menyelesaikan masalah (*problem solving*) dan mencegah kejahatan secara kolaboratif dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat (*giat3114,3128,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) meningkatkan kegiatan menetralsir informasi negatif ditengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri (*giat3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);
- c) meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "edukasi" dan himbauan kepada masyarakat berupa mendukung dan mensukseskan program pemerintah serta pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan melalui produksi

konten

konten kreatif, melaksanakan *press release* tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polres Metro Jakarta Selatan

(*giat3070,3149/progDukma/SP1/SS5/IKP7*);

- d) meningkatkan kegiatan patroli yang adaptif di wilayah rawan kejahatan dan kriminalitas serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit/Obvitnas dan destinasi pariwisata
(*giat3130,3131,5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*).

- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya guna menumbuh kembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*) serta menyukseskan program ketahanan pangan
(*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- b) peningkatan kegiatan pemberdayaan pengembangan kewenangan fungsi Kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);
- c) meningkatkan kegiatan pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP

giat

(giat3133,5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);

- d) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi *ISDC* sebagai pusat unggulan pelatihan *safety driving* dan kampanye budaya tertib lalu lintas kepada masyarakat pengguna jalan *(giat3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1)*.

- 5) arah bijak: mengedepankan penanganan konflik ditengah masyarakat secara humanis.

Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis *(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);*

- b) meningkatkan kegiatan mengorganisasikan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang bersifat positif *(giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2);*

- c) meningkatkan respons cepat penggelaran pasukan Brimob Polres Metro Jakarta Selatan dalam pengamanan konflik yang dilakukan secara humanis pada saat dan pasca konflik *(giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6)*.

- 6) arah bijak: meningkatkan kegiatan Kamseltibcarlantas kepada masyarakat guna memberikan rasa aman saat berkendara, terjadi kemacetan dan saat pada jam rawan kejahatan.

Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kepolisian yang adaptif dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli ditengah masyarakat guna mengurangi angka

kecelakaan

kecelakaan serta mengamankan jalur distribusi pangan
(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan yang adaptif di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas

(*giat3130,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan yang adaptif di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "Akselerasi Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif" serta berperan aktif ditengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas

(*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*).

- 7) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polres Metro Jakarta Selatan ditengah masyarakat baik di wilayah bencana dan "*Slum Area*".

Untuk mewujudkan arah bijak 7, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kesiapsiagaan personel Brimob Polres Metro Jakarta Selatan yang mampu digerakkan dalam menghadapi "ketanggapsegeraan" dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi serta di wilayah rawan kriminalitas yang berintensitas tinggi, bencana serta wabah
(*giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU6*);
- b) meningkatkan dukungan penyelenggaraan dan pelayanan bantuan penanganan *Search and Rescue (SAR)* terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan

yang

yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa

(*giat3130,5081,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);

- c) meningkatkan akurasi dalam memetakan desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh “*Bhabinkamtibmas*” yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang menjadi korban saat dan pasca bencana (*giat5076/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU2*);

- d) meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan kesehatan” dan “*trauma healling*” pada daerah rawan gempa dan bencana (*giat3072,progDukma,giat3110,progProfesionalismeSD M/ SP1/SS1/IKU2/SS3/IKP1*).

- 8) arah bijak: melaksanakan “*back up*” kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergitas dengan *stakeholder* terkait penanganan gangguan keamanan dan bencana.

Untuk mewujudkan arah bijak 9, maka terdapat lima strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan koordinasi kesiapan dari personel Polres Metro Jakarta Selatan agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka “*back up*” pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan wilayah rawan konflik (*giat3130,5076,5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- b) meningkatkan sinergisitas dalam membangun kerja sama dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif

giat

(*giat5076,5087,5080/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*);

- c) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas (*giat3130,3131,3133/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*);
- d) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu (*giat3131/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU5*);
- e) meningkatkan pelaksanaan "*back up*" pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba (*giat5081/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU3*).

- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum.

Untuk mewujudkan arah bijak 10, maka terdapat satu strategi yang akan dilakukan, yaitu:

meningkatkan pelaksanaan kegiatan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementrian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergisitas dengan "*stakeholder*" terkait (*giat3120/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU8*).

- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran kegiatan patroli kapal di seluruh daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan guna mendukung kegiatan keamanan laut.

Untuk mewujudkan arah bijak 11, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan patroli kapal Polri dan "*back up*" di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kegiatan pengamanan pada jalur niaga di seluruh wilayah laut hukum Polres Metro Jakarta Selatan (*giat3134/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU4*).
- b. Sasaran Prioritas II “Mewujudkan Pelayanan Publik Polres Metro Jakarta Selatan yang Berkualitas dan Terintegrasi”, terdiri dari tiga arah bijak sebagai berikut:
 - 1) meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda;
 - 2) meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan;
 - 3) meningkatkan “*ketanggap segeraan*” dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan, Harkamtibmas dan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan dan menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat secara multimoda. Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) meningkatkan layanan pengaduan berbasis *hotline*, *website* atau media sosial guna meningkatkan citra Polri yang responsif dan tidak *berbelit-belit* (*giat3071/progDukma/SP2/SS5/IKU7*);
 - b) meningkatkan kolaborasi dalam penanganan pelayanan pengaduan guna memberikan

kenyamanan

kenyamanan kepada masyarakat saat menyampaikan keluhannya(*giat3089,3091,5086/progDukma,LidikSidik/SP2/SS2/IKU9/ SS5/IKP7*).

- 2) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan pelayanan yang adaptif dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat enam strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan *Online* yang terintegrasi serta adaptif dalam pelayanan di kantor pelayanan/keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat melalui penguatan SuperApp, e-SIM, Samsat Digital, dan integrasi basis data kendaraan serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik Kepolisian (*giat3133/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1*);
- b) meningkatkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor perluasan layanan daring, interoperabilitas sistem (SIM, STNK, tilang), dan pembaruan infrastruktur digital (*giat3133/progHarkamtibmas/giat3071/progDukma/SP2/SS1/IKU1*);
- c) meningkatkan *update* informasi dan dokumentasi pada layanan/laman *website humaspolri.go.id* secara berkala guna meningkatkan citra positif Polres Metro Jakarta Selatan dimata masyarakat(*giat3149/progDukma/SP2/SS5/IKP7*);
- d) meningkatkan inovasi dan perbaikan yang adaptif dalam memberikan pelayanan Intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK *online*

giat

(*giat3112/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU11*);

- e) meningkatkan kegiatan penilaian atas kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polres Metro Jakarta Selatan pada Dokkes jajaran (*giat3072/progDukma/SP2/SS1/IKU*);
- f) meningkatkan kegiatan *Binmas Online System (BOS)* dengan *Online Single Submission (OSS)* dalam memberikan respon cepat atas penerbitan surat ijin operasional

BUJP

(*giat5076/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU2*).

- 3) arah bijak: meningkatkan "*ketanggapsegeraan*" dalam melayani masyarakat baik dalam pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan, harkamtibmas dan penegakkan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melanjutkan, melaksanakan Monev dan terus mengkaji guna merespons aturan/SOP dipelayanan publik yang berbelit- belit(*giat5053/progDukma/SP2/SS5/IKP4*);
- b) meningkatkan "*Respons Time*" dalam kesiapan untuk memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban (*giat5081/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU3*);
- c) meningkatkan dan merespon pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu yang lebih adaptif melalui pembinaan teknis dan audit (*giat3130,3131/progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU5*).

- c. Sasaran Prioritas III "Menegakkan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan" terdiri dari tiga arah bijak sebagai berikut:

1) mengedepankan

- 1) mengedepankan kolaborasi dan kerja sama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2) meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan;
- 3) meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) Arah bijak: mengedepankan kolaborasi dan Kerjasama antar penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat sembilan strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kolaborasi dan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan daerah hukum Polres Metro Jakarta Selatan
(*giat4342/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU7*);
- b) meningkatkan kegiatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan dengan serta tindak pidana siber, judi *online*, penyelundupan barang, korupsi (pencegahan dan *asset recovery*), Narkoba, terorisme, Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan TPPO dan kekerasan terhadap perempuan dan anak
(*giat3142,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/IKU3/IKU4*);
- c) meningkatkan kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan,

pertanahan

pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan)

(*giat3142,3145,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU4*);

- d) melaksanakan kegiatan penindakan tindak pidana di perairan dalam mendukung kegiatan keamanan laut (*giat4342/progSidikLidik/SP3/SS2/IKU7*);
- e) melaksanakan dan meningkatkan kegiatan penanganan/ penindakan tindak pidana dan pelanggaran Lalu Lintas melalui integrasi kamera Pemda, *private sector* dan pelatihan personel dalam rangka mewujudkan “*Road Safety*” serta penegakkan hukum melalui “*ETLE*” dan tilang manual (*giat3133/progHarkamtibmas,4343/progSidikLidik/SP3/SS1/IKU1/SS2/IKU6*);
- f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan penyelesaian perkara melalui “*Restorative Justice*” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan (*giat3142/progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb*);
- g) meningkatkan penanganan kejahatan di ruang siber (*cyber crime*) yang mengedepankan kualitas serta mengedukasi masyarakat (*giat3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2*);
- h) melaksanakan penindakan hukum terbatas/Tipiring dalam menjaga Harkamtibmas (*giat3130/progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb*);
- i) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara- perkara secara responsif guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (*giat3142,3144,3145,3146,3151/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*).

- 2) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas sertifikasi bagi penyidik Polres Metro Jakarta

Selatan(*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2*);

- b) meningkatkan kualitas dan kemampuan pemeriksa baik *Labfor* dan *Inafis* dalam pengelolaan TKP untuk membuat terang perkara (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP3/SS3/IKP2*).

- 3) arah bijak: meningkatkan dan mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penegakan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan pelaksanaan pemberian *SP2HP2* kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir *komplain* dari masyarakat kepada Polres Metro Jakarta Selatan di bidang penegakan hukum dan menjunjung tinggi HAM sebagai bentuk pelayanan kepada pelapor/korban dan tersangka (*giat3137,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*);

- b) mengoptimalkan peran "*Waskat*" dari atasan penyidik dan peran dari *Wassidik* guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU1/IKU2/IKU3/IKU4/IKU5/IKU6/IKU7/IKU8*);

- c) mengoptimalkan

- c) mengoptimalkan penggunaan *e-MP* (e-manajemen penyidikan) dalam mewujudkan sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di seluruh Polri
(*giat5085,5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU9*).
- d. Sasaran Prioritas IV “Mewujudkan SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang Profesional, Cerdas dan Berintegritas melalui Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan” terdiri dari enam arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai;
 - 2) mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
 - 3) mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan “*Strategic Workforce Planning*”;
 - 4) meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam negeri;
 - 5) melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*);
 - 6) meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Metro Jakarta Selatan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Dengan

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan Pendidikan dan Latihan Polri guna mewujudkan SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta siap pakai; Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat delapan strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi lulusan Diklat, gadik/instruktur dan pengasuh (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);
 - b) meningkatkan pelaksanaan latihan dan harkatpuan fungsi "*Negosiator dan Dalmas*" yang menjunjung tinggi HAM dalam rangka penanganan konflik secara humanis, menghadapi pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);
 - c) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "*Menjunjung Tinggi HAM*" dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan tahapan pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100, 3130,5076,5087/progProfesionalismeSDMPolri, progHarkamtibmas/SP4/SS1/IKU3/SS3/IKP2*);
 - d) meningkatkan kualitas dan *kapasitas* SDM Siber Polres Metro Jakarta Selatan, serta digital forensik yang "*Profesional*" dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas serta mendukung pengamanan *event* nasional/internasional tahun 2026 (*giat3100,3151/progProfesionalismeSDMPolri,Lidik Sidik/SP4/SS2/IKU1/IKU2/SS3/IKP2*);
 - e) meningkatkan

- e) meningkatkan jumlah peserta sertifikasi profesi bagi anggota penyidik Reskrim, Polair serta Ditlantas Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka mengantisipasi penerapan KUHP baru (*giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP2*);
 - f) meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah bagi anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan ASN Polres Metro Jakarta Selatan guna memaksimalkan waktu yang diperlukan dari waktu persetujuan permintaan pengadaan hingga waktu barang/jasa yang diminta diterima (*giat3100/progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP2/SS4/IKP*);
 - g) melaksanakan peningkatan kualitas kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel kedokteran Kepolisian melalui seminar/*workshop* (*giat3072,3100/progDukma,progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP2*);
 - h) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi dan keuangan serta mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi (*giat3068,3091/progDukma/SP4/SS3/IKP2*).
- 2) arah bijak: mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna *SPBE*.
- Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan (*giat5052/progDukma/SP4/SS5/IKP1*);
 - b) mewujudkan

- b) mewujudkan pengembangan dan penerapan model operasional baru yang adaptif di area-area prioritas pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Polres Metro Jakarta Selatan yang berkualitas dan terpercaya (*giat5053/progDukma SP4/SS5/IKP4*);
- 3) arah bijak: mewujudkan kualitas dan kapabilitas SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang unggul dan humanis serta menyusun ukuran organisasi yang optimal dengan menerapkan "*Strategic Workforce Planning*". Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) melanjutkan untuk menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mendefinisikan dan mengartikulasikan kembali "*Employee Value Proposition*" (*EVP*) Polres Metro Jakarta Selatan (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);(G.S)
 - b) melanjutkan dan menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi dalam penyiapan kader pimpinan Polres Metro Jakarta Selatan yang bersih dan bebas dari praktik KKN (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*); (G.S)
 - c) mengelola kesiapan personel Polri sebanyak 1.667 Pers yang akan ditugaskan di IKN secara bertahap (*giat3108/progProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP1*).
- 4) arah bijak: meningkatkan dan melanjutkan kerja sama pendidikan di dalam negeri.
Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat satu strategi yang akan dilakukan, yaitu:

meningkatkan dan melanjutkan kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi dalam negeri

(*giat3100,3120/progProfesionalismeSDMPolri,progHarkamti bmas/SP4/SS1/IKU8/SS3/IKP2*).

- 5) arah bijak: melaksanakan dan menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*).

Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat empat strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melanjutkan penyempurnaan standard penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam sistem manajemen penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "*sistem reward and punishment*" serta sistem *reward* terhadap kualifikasi personel Polres Metro Jakarta Selatan yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- b) memedomani sistem manajemen penilaian kompetensi Polres Metro Jakarta Selatan (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "program manajemen talenta" (*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);
- c) mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja *online* dengan SIPP guna menerapkan *Merit System* dalam manajemen pembinaan karier dalam

rangka

rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya(*giat3108/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*);

- d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus (*giat3100,5076/progProfesionalismeSDMPolri,progHarkamtibmas/ SP4/SS1/IKU2/SS3/IKP1/IKP2*).

- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polres Metro Jakarta Selatan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja.

Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polres Metro Jakarta Selatan dan masyarakat (*giat3072/progDukma,ProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/ IKP1*);
- b) mengoptimalkan pelayanan yang responsif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polres Metro Jakarta Selatan yang gugur/tewas dalam tugas menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan *user friendly* (*giat3072,3105/progDukma,progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS3/IKP1*);
- c) meningkatkan pelayanan administrasi pegawai yang adaptif bagi anggota Polres Metro Jakarta Selatan, menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan *user friendly* termasuk berkaitan dengan ASABRI (*giat3105/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP1*).

e. Sasaran

- e. Sasaran Prioritas V “Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Terintegrasi dalam Mendukung Operasional Kepolisian” terdiri dari empat arah bijak sebagai berikut:
- 1) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polres Metro Jakarta Selatan (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (G.S)
 - 2) meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polres Metro Jakarta Selatan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang dan mendorong pembangunan rumah dinas;
 - 3) melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SC/;
 - 4) mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. (G.S)

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polres Metro Jakarta Selatan (*IT Enterprise Architecture*) yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat sebelas strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) pemenuhan almatsus Polres Metro Jakarta Selatan yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung kesiapan operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi serta pemeliharaan keamanan(*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);

b) mengoptimalkan

- b) mengoptimalkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi fungsi lalu lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online (*giat3084 ,3133/progModernisasi AlmatsusSarprasPolri,prog Harkamtibmas /SP5/SS4/IKP2*);
- c) melanjutkan kegiatan pengembangan Pembangunan Indonesia Safety Driving Center di kewilayahan (*giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- d) meningkatkan kualitas pembangunan RTMC/TMC di kewilayahan (*giat3133/progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- e) mengoptimalkan pemasangan ETLE guna mendukung penegakan hukum secara transparan di jalan raya (*giat3084,3133/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri, progHarkamtibmas/SP5/SS4/IKP2*);
- f) meningkatkan dan mengembangkan pembangunan sistem komunikasi di wilayah rawan bencana agar terkoneksi dalam menjaga Harkamtibmas (*giat3084,/progDukma,progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
- g) pemenuhan peralatan penanganan awal/pasca Bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka *backup* wilayah dan pertolongan pertama(RPJMN)(*giat3084/progModernisasiSarprasPolri/S P5/SS4/IKP2*);
- h) pemenuhan Almatsus Polres Metro Jakarta Selatan berbasis kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi hijau(RPJMN) (*giat3084/ progModernisasiSarprasPolri/ S P5/SS4/IKP2*);

i) pemenuhan

- i) pemenuhan Almatsus/Alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan nasional/internasional 2026, perbatasan dan destinasi wisata (*giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - j) mendukung pemenuhan alat mesin pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional (*giat3084/progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - k) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan arsitektur TI Polri (*IT Enterprise Architecture*) (G.S) (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*).
- 2) arah bijak: meningkatkan pemenuhan rumah dinas pegawai Polres Metro Jakarta Selatan serta pembangunan fasilitas perkantoran/gudang. Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat lima strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) meningkatkan pembangunan fasilitas pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polres Metro Jakarta Selatan (*giat5061/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - b) mengoptimalkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya (FKTP/poliklinik) yang dekat dengan personel dan masyarakat guna mendukung "Sistem Kesehatan Nasional" (*giat5061/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - c) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran (Polres/Polsek) dan Rumdin (*giat5061/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP2*);
 - d) mendukung

- e) mendukung pemenuhan Gudang ketahanan pangan Polri dalam rangka ketahanan pangan nasional (*giat5061/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2*);
 - e) mendukung pemenuhan Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri dalam rangka Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat (*giat5061/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2*).
- 3) arah bijak: melanjutkan kegiatan pengembangan Almatsus SCI. Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- melaksanakan kegiatan pemetaan dan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dan sidik jari dengan teknologi terkini(*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/IKP2*).
- 4) arah bijak: mengoptimalkan dan membangun kemampuan digital dengan mengembangkan *Data, Digital Platform and Software (DDPS)* yang terintegrasi dalam Satu Data Polri. Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) keberlanjutan pelaksanaan roadmap digitalisasi Ditlantas, seperti penguatan *superApp*, e-SIM, Samsat Digital, dan integrasi basis data kendaraan (*giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2*)
 - b) melaksanakan pemetaan dan hasil kajian Satu Data Polri untuk pengadaan sistem informasi Kepolisian

secara

secara bertahap yang terintegrasi

(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKP 2);

- c) meningkatkan kegiatan pengembangan teknologi Kepolisian dan sistem informasi berdasarkan hasil penelitian/kajian yang telah dilaksanakan *(giat3084/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS 4/IKP2).*

f. Sasaran Prioritas VI "Meningkatkan dan Mewujudkan Budaya Integritas, Kejujuran dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik" terdiri dari enam arah bijak sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi Kepolisian dan masyarakat; (G.S)
- 2) meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal Polres Metro Jakarta Selatan guna menjaga citra Polri ditengah masyarakat;
- 3) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka *Good Government and Clean Governance*;
- 4) meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polres Metro Jakarta Selatan yang transparan dan akuntabel;
- 5) melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polres Metro Jakarta Selatan agar lebih efektif dan efisien;
- 6) meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan publik ramah

kelompok

kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik.

Dengan penjelasan masing-masing arah bijak sebagai berikut:

- 1) arah bijak: meningkatkan kegiatan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online* melalui *redesain* interaksi Kepolisian dan masyarakat.

Untuk mewujudkan arah bijak 1, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) mengoptimalkan kegiatan klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu yang berbasis TI (*giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
- b) mengoptimalkan dan menyempurnakan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara *online* (*giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7*);
- c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas *eksternal* dengan berbasis TI (*giat3089,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP7*).

- 2) arah bijak: meningkatkan kegiatan Saber Pungli di lingkungan internal guna menjaga citra positif Polri di tengah masyarakat. Untuk mewujudkan arah bijak 2, maka terdapat enam strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan kegiatan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli serta pelaporan yang terintegrasi (*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*);
- b) mendorong pelayanan publik secara *online* yang bersih transparan dan akuntabel berbasis *hotline*, *police*

superApp, Police website, dan social media

(giat3091,3149/progDukma/SP6/SS5/IKP5);

- c) melaksanakan kerja sama dengan *stakeholder* terkait dalam pencegahan pungli
(giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- d) melaksanakan kegiatan pengamanan (kegiatan, Personel, Baket) dalam rekrutmen pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- e) melaksanakan pengamanan kegiatan Personel, Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5);
- f) melaksanakan "operasi bersih" di internal dan di sentra pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan baik terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik (SIM, STNK, BPKB, SKCK)
(giat3089,3090/progDukma/SP6/SS5/IKP5).

- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polres Metro Jakarta Selatan dalam rangka *Good Government and Clean Governance*.

Untuk mewujudkan arah bijak 3, maka terdapat dua strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) meningkatkan peran serta dari seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polres Metro Jakarta Selatan melalui Aplikasi *Whistle Blower System (WBS)*, serta bersinergisitas dan berkolaborasi dengan lembaga pemeriksa *eksternal* serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi
(giat3089,3090,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5);

b) meningkatkan

- b) meningkatkan kegiatan kepatuhan terhadap implementasi dari Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
(*giat3091/progDukma/SP6/SS5/IKP5*).
- 4) arah bijak: meningkatkan tata kelola dari sistem manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polres Metro Jakarta Selatan yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan arah bijak 4, maka terdapat lima strategi yang akan dilakukan, yaitu:
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan dan penganggaran satker agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program dan kegiatan (*giat4339/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - b) meningkatkan sinergisitas dalam penyusunan kebutuhan Polri di aplikasi e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan dan penganggaran Polres Metro Jakarta Selatan (Penjabaran Domren Kapolri, Rancangan Renja Polres Metro Jakarta Selatan dan Renja Polres Metro Jakarta Selatan) agar selaras pembangunan di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan dan semakin berkualitas (*giat5051/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker(*giat3068,3091,4339,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - d) melaksanakan

- d) melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan (*giat3068,4339,3091/progDukma/SP6/SS5/IKP6*);
 - e) melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran di bidang pembinaan dan operasional (*giat3068,4339,3091,5054/progDukma/SP6/SS5/IKP6*).
- 5) arah bijak: melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polres Metro Jakarta Selatan agar lebih efektif dan efisien.
- Untuk mewujudkan arah bijak 5, maka terdapat tiga strategi yang akan dilakukan, yaitu:
- a) melaksanakan Monev atas pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta Monev hasil efektivitas mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan) (*giat4339,5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya (*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*);
 - c) penyempurnaan kaitan ABK dan DSPP serta peraturan tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta menyusun kesiapan pembentukan Satwil baru (*giat5052/progDukma/SP6/SS5/IKP1*).
- 6) arah bijak: meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi Polri antara lain melalui pembangunan zona integritas, peningkatan indeks pelayanan publik, peningkatan pelayanan

publik ramah kelompok rentan, penciptaan inovasi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik.

Untuk mewujudkan arah bijak 6, maka terdapat tujuh strategi yang akan dilakukan, yaitu:

- a) melaksanakan Bimtek kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polres Metro Jakarta Selatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pelayanan publik melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, humanis dan bebas dari korupsi

(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);

- b) melaksanakan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan pada Polres Metro/Polresta/Polres untuk meningkatkan indeks pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan *(giat5053/progDukmaSP6/SS5/IKP4);*
- c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi Polri yang memenuhi syarat ke ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) serta Pemantauan dan Keberlanjutan Replikasi Inovasi (PKRI) pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan *(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);*
- d) peningkatan kualitas pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan melalui penyeragaman nomenklatur unit-unit pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan *(giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4);*

e) peningkatan

- e) peningkatan kualitas pelayanan publik Polres Metro Jakarta Selatan melalui penyediaan unit pelayanan publik yang ramah kelompok rentan (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- f) melanjutkan dan meningkatkan kegiatan asistensi pembangunan zona integritas kepada Satker/Satwil di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan guna meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil berpredikat WBK dan WBBM(*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- g) memberikan asistensi dan bimbingan teknis untuk mendorong capaian jumlah unit kerja berpredikat WBK dan WBBM (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*);
- h) sebagai *quality insurence* dengan melaksanakan *assessment* terhadap seluruh unit kerja yang sudah berpredikat baik WBK dan WBBM agar tetap mempertahankan dan meningkatkan peredikat pembangunan zona integritas baik WBK dan WBBM. (*giat5053/progDukma/SP6/SS5/IKP4*).

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan

Tahun Anggaran 2026

1. Program dan Kegiatan Polres Metro Jakarta Selatan

a. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya tata Kelola Polres Metro Jakarta Selatan yang “*good governance* dan *clean government*” melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan

2) Kegiatan:

- a) Pelayanan Administrasi Keuangan Polri;
- b) Penerangan Masyarakat;
- c) Penyelenggaraan Teknologi Informasi;
- d) Pelayanan Kesehatan Polri;
- e) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri;
- f) Pertanggungjawaban Profesi;
- g) Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri;
- h) Penegakan Tata tertib dan Disiplin Polri;
- i) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan;
- j) Pengelolaan Multimedia;
- k) Pemberian Bantuan dan Nasehat Hukum;
- l) Kerjasama dan Penyuluhan Hukum;
- m) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran Polri;
- n) Penyusunan Kebijakan Polri;
- o) Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polri;
- p) Reformasi Birokrasi Polri;
- q) Manajemen Anggaran;
- r) Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

b. Program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri.

1) Tujuan:

Mendukung terpeliharanya Harkamtibmas dan Penegakkan Hukum melalui tata kelola dan modernisasi Almitsus serta sarana prasarana guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi Polres Metro Jakarta Selatan di bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) Pengembangan Peralatan Polri;
- b) Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras;
- c) Pengembangan Perbekalan Umum.

c. Program

c. Program Profesionalisme SDM Polri.

1) Tujuan:

Terwujudnya postur SDM Polres Metro Jakarta Selatan yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas di era 5.0, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

2) Kegiatan:

- a) Dukungan Manajemen dan Teknis Profesionalisme SDM Polri;
- b) Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri;
- c) Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri;
- d) Pembinaan Karier Personel Polri;
- e) Pelayanan Psikologi Anggota Polri.

d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

1) Tujuan:

terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional Polres Metro Jakarta Selatan dan informasi Kepolisian serta melaksanakan kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi/dini, *preemptif* dan *preventif*.

2) Kegiatan:

- a) Analisis Keamanan;
- b) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Politik;
- c) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Ekonomi;
- d) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Sosial Budaya;

e) Penyelenggaraan

- e) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Negara;
 - f) Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban K/L;
 - g) Dukungan Manajemen dan Teknis Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - h) Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara;
 - i) Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital;
 - j) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;
 - k) Penyelenggaraan Kepolisian Perairan;
 - l) Penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban Bidang Keamanan Khusus;
 - m) Pembinaan Potensi Keamanan;
 - n) Pembinaan Operasi Kepolisian;
 - o) Pengendalian Operasi Kepolisian;
 - p) Pelacakan dan Penangkalan Keamanan dan Ketertiban;
 - q) Penanggulangan Keamanan dalam Negeri.
- e. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
- 1) Tujuan:
terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 2) Kegiatan:
 - a) Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
 - b) Penindakan Tindak Pidana Umum;
 - c) Penindakan Tindak Pidana Narkoba;
 - d) Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus;
 - e) Penindakan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Penindakan Tindak Pidana Siber;
 - g) Penindakan Tindak Pidana Perairan;
 - h) Penindakan

- h) Penindakan Tindak Pidana Lalu Lintas;
- i) Pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;
- j) Penindakan Tindak Pidana Tertentu;
- k) Koordinasi dan Pengawasan PPNS;
- l) Pengawasan Penyidikan.

2. Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026

- a. Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 158.813.041.000,- (seratus lima puluh delapan milyar delapan ratus tiga belas juta empat puluh satu ribu rupiah) mengalami Kenaikan sejumlah Rp 1.573.722.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau naik 2,60% dibandingkan dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 157.239.319.000,- (seratus lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- 1) rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 per Jenis Belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Pegawai Rp 122.626.815.000,-; setelah Penajaman Rp. 122.615.223.000,-; (honor PNS berkurang)
 - b) Belanja Barang Rp 38.710.638.000,-; setelah Penajaman Rp. 36.197.818.000,-;
- 2) rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni Rp 156.675.463.000,-;
 - b) PNBP Rp 2.137.578.000,-;
- 3) rincian Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 per Program sebagai berikut:
 - a) Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp 12.400.441.000,-
 - b) Modernisasi

- b) Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri
Rp 30.928.000,-
 - c) Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Rp 9.155.585.000,-
 - d) Dukungan Manajemen Rp 137.226.087.000,-
- b. kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026
 - 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, termasuk dari pemenuhan *Intake* Polri tahun 2025, dan usulan kenaikan ini termasuk rencana untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 - 2) kegiatan belanja barang operasional anggaran perkantoran (antara lain: internet, listrik, air, biaya pemeliharaan peralatan fungsional, BMP (kendaraan bermotor/pesawat udara), dukungan kesehatan, Kapor, Harwat dan makan tahanan, pemeliharaan dan perawatan *Command Center*, kebutuhan *werving* Diktuk, daya dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
 - 3) kegiatan belanja barang non operasional fungsi teknis Kepolisian, berupa: deteksi aksi dan deteksi dini dari potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, pengamanan kegiatan masyarakat baik skala nasional dan internasional, pengamanan destinasi wisata, memperhatikan Satker baru, Polres baru, biaya rekrutmen, opsional Pendidikan, Dukopsnal Bhabinkamtibmas, perpanjangan lisensi *D.F*, tambahan anggaran Intelijen, sidik-lidik, dan harwat tahanan,

pengamanan

pengamanan nasional/internasional 2026 serta untuk mendukung tercapainya Proyek Prioritas Nasional tahun 2026 di Polres Metro Jakarta Selatan;

- 4) pemenuhan penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polri, meningkatkan pelayanan publik Polri (SPKT/RPK/Satpas dan BPKB), penanganan gejolak/ konflik sosial, penanganan "*flashpoint*", penyebaran berita *hoaks* dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, siber dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontingensi, pemenuhan Almatsus destinasi wisata, Almatsus Polri serta peralatan dalam mendukung *event* nasional/ internasional tahun 2026, pemenuhan fasilitas Polri (rumah sakit/ poliklinik), fasilitas kantor Satker baru (mako Polsek/Polres), pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan negara bagi personel Polri untuk kesatuan baru;
- 5) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polres Metro Jakarta Selatan yang memasuki era *Artificial Intelligence (A.I)* baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional dan Presisi yang berbasis data;
- 6) meningkatkan kegiatan *preemtif* dan *preventif* secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui "Strategi Polmas" guna mewujudkan Polisi modern di era *Artificial Intelligence (A.I)* dengan penerapan "*personal smart tools*" dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- 7) mendukung kegiatan pertumbuhan ekonomi nasional dan proyek nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029

termasuk

termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketahanan pangan, serta keamanan di laut sebagai poros maritim dengan memperkuat Satuan Polair dan Poludara baik di tingkat pusat maupun kewilayahan;

- 8) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional;
- 9) meningkatkan pelaksanaan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polres Metro Jakarta Selatan kepada masyarakat serta pemberian advokasi terhadap institusi Polres Metro Jakarta Selatan, anggota Polres Metro Jakarta Selatan maupun keluarga Polres Metro Jakarta Selatan dan masyarakat;
- 10) empat arah kebijakan utama "Presisi" mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri (Beyond Trust Presisi) yang terdiri dari:
 - a) Transformasi Organisasi;
 - b) Transformasi Operasional;
 - c) Transformasi Pelayanan Publik;
 - d) Transformasi Pengawasan.
- 11) 7 Program "Beyond Trust Presisi" meliputi:
 - a) Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital;
 - b) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul;
 - c) Menciptakan Suasana Kondusif di Masyarakat (Cooling System);
 - d) Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas;
 - e) Mengoptimalkan Penegakkan Hukum yang Tegas dan Humanis;
 - f) Tematik;
 - g) Mengoptimalkan Pengawasan.

V. Penutup

V. Penutup

Demikian Rencana Kerja Polres Metro Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2026 disusun sebagai bahan masukan/pedoman Satker di lingkungan Polres Metro Jakarta Selatan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pembinaan untuk melayani masyarakat di bidang Harkamtibmas dan Penegakan Hukum Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di: Jakarta

pada tanggal: 17 Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKSEL



NICOLAS ARY LILIPALY, S.I.K., M.H., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI 73090617

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) POLRES METRO JAKARTA SELATAN TAHUN 2026

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	KET
			2026	
1	2	3	4	5
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui kepolisian yang berintegritas, modern, dan akuntabel.	Indeks Keamanan dan Ketertiban Kota.	3,6	Sasaran Impact
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	Indeks Harkamtibmas Polres Metro Jakarta Selatan.	80,16	
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan	Indeks Gakkum Polres Metro Jakarta Selatan.	60,07	
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh	Indeks Profesionalitas SDM Polres Metro Jakarta Selatan.	2,78	
SS4	Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern	Tingkat pemenuhan <i>Minimum Essential Police Equipment</i> (MEPE)	41%	
SS5	Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel	a. Nilai SAKIP	73,4	
		b. Nilai Kinerja Anggaran.	100%	
		c. Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang dihadapi Polres Metro Jakarta Selatan.	71%	

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 17 Juni 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR METRO JAKSEL



NICOLAS ARY LILIPALY, S.I.K., M.H., M.Si.
KOMISARIS BESAR POLISI 73090617